

**Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa  
(Studi Kasus: Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Patuk  
Kabupaten Gunungkidul 2023)**

**Skripsi**



Disusun oleh:  
ZAIN INDRANUR  
2006016102

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2024**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Zain Indranur

NIM : 2006016102

Jurusan : Ilmu Politik

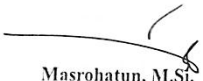
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Patuk Kabupaten Gunungkidul 2023)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Semarang, 10 Desember 2024

Pembimbing, Bidang Substansi

Materi dan Tatatulis



Masrohatun, M.Si.

NIP : 198806212018012001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS:  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA PATUK KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL 2023)**

Disusun Oleh:  
Zain Indranur  
2006016102

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji pada tanggal 19 Desember 2024 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji:



Sekretaris

Solkiah Mufrikah, M. Si.  
NIP. 198505102023212058

Penguji I

Muhammad Mahsun, M.A.  
NIP. 198511182023211019

Pembimbing

Masrohatun, M.Si  
NIP. 198806212018012001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Zain Indranur menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Patuk Kabupaten Gunungkidul 2023)*” merupakan hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya, pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, saya bersedia konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan,



**Zain Indranur**  
**NIM 2006016102**

## **MOTO**

**“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung”  
(QS. Al Anfal: 40)**

**“Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”  
(QS. Ali Imron: 173)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur ke hadirat Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan kasih sayang dan rahmat-Nya memberikan kehidupan serta kesempatan untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan-Nya. Nikmat nafas yang terus mengalir dalam kehidupan ini anugerah yang tak terhingga, memungkinkan diri ini untuk tetap berjuang menyelesaikan setiap amanah dengan sepenuh hati.
2. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan cinta, doa, dan dukungan tanpa henti dalam setiap langkah hidupku.
3. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam setiap perjalanan studiku.
4. Rekan-rekan seperjuangan, organisasi yang telah berbagi suka dan duka perjuangan selama masa perkuliahan.
5. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Walisongo, yang telah menjadi tempat menimba ilmu dan memperluas wawasan.
6. Kepada pihak-pihak yang selalu menanyakan, “Kapan selesai?”, “Kapan wisuda?”, “Kapan kerja?”, dan “Kapan memiliki masa depan?”. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini.

Semoga skripsi ini dapat menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita dan memberikan manfaat bagi banyak orang.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Patuk Kabupaten Gunungkidul 2023)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana S-1 Ilmu Politik pada Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
2. Prof. Dr. Imam Yahya M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh jajaran staf dan dosen di Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. M. Nuqlir Bariklana, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo
4. Masrohatun, M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo.

5. Masrohatun, M.Si, selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Tika Ifrida Takayasa M.A., selaku Dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademik selama penulis menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Catur Bowo, selaku kepala Desa beserta seluruh jajaran pamong Desa Patuk Kabupaten Gunungkidul.
8. Sumadi, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Patuk Kabupaten Gunungkidul.
9. Orang tua dan keluarga besar tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.
10. Organisasi Otonom Muhammadiyah sebagai tempat berproses dan berjuang dalam menimba ilmu agama, kemanusiaan serta keorganisasian.
11. rekan-rekan mahasiswa di Ilmu Politik C 2020 dan seluruh pihak yang telah kebersamai dalam perkuliahan di kampus tercinta ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
12. rekan-rekan mahasiswa yang telah berjuang bersama selama proses perkuliahan di kampus *Neon Green* tercinta ini. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, dukungan dan kebersamaan mereka sangat berarti bagi penulis
13. terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan,

terutama dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan mendapatkan balasan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca sekalian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 10 Desember 2024



**Zain Indranur**

**NIM 2006016102**

## ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Patuk, Kabupaten Gunungkidul, selama tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan mereka dalam proses pembangunan fisik desa. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih terbatas pada partisipasi Pemikiran dalam proses perencanaan lalu tenaga, uang maupun barang, pada proses pelaksanaan dan pada proses evaluasi bentuk opname fisik meliputi Verifikasi Kualitas, Pengukuran Kuantitas, Menyelidiki, Dokumentasi, dan Rekomendasi Perbaikan. Partisipasi tersebut dipengaruhi oleh harapan, Sumber Daya Manusia, dan kondisi sosial desa. Faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Patuk mencakup proses pengambilan keputusan yang tidak efektif karena masukan aspirasi masyarakat sering kali tidak terwakili dengan baik sehingga mengakibatkan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil pedesaan. Penelitian ini menyoroti pentingnya mekanisme partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) dalam mengoptimalkan kontribusi masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat berbagai tantangan dan hambatan dapat diatasi menjadikan pembangunan infrastruktur di Desa Patuk sebagai peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur desa.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, pembangunan desa, infrastruktur jalan, Desa Patuk.

## **Abstract**

Village development is an important aspect in improving community welfare and quality of life, as mandated by Law Number 6 of 2014. This research focuses on community participation in the development of road infrastructure in Patuk Village, Gunungkidul Regency, during 2023. This study aims to identify the level of community participation and factors that affect their involvement in the process of village physical development. Using a qualitative approach with case studies, data were obtained through in-depth interviews, observations, and document analysis. The results of the study show that community participation is still limited to the participation of Thinking in the planning process and then energy, money and goods and in the implementation process and in the evaluation process of physical forms of opname including Quality Verification, Quantity Measurement, Investigation, Documentation, Improvement Recommendations. The participation is influenced by expectations, human resources, and social conditions of the village. Factors that hinder community participation in development in Patuk Village include an ineffective decision-making process because the input of community aspirations is often not well represented, resulting in development that is not in accordance with the real needs of the countryside. This study highlights the importance of participatory mechanisms such as the Village Development Planning Conference (Musrenbang) in optimizing community contributions. With strong synergy between the village government and the community, various challenges and obstacles can be overcome, making infrastructure development in Patuk Village an increase in the effectiveness and sustainability of village infrastructure development.

**Keywords:** Community participation, village development, road infrastructure, Patuk Village.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
MOTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
Abstract .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat.....	13
E. LITERATUR REVVIEW .....	14
F. Teori.....	24
G. Metode penelitian .....	33
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	40
BAB II <u>K</u> ERANGKA TEORI .....	43
A. Partisipasi Masyarakat.....	43
1. Pengertian Partisipasi.....	43
2. Efektivitas Partisipasi .....	44

3. Ciri-ciri partisipasi .....	44
4. Bentuk-bentuk Partisipasi .....	45
B. Pembangunan .....	46
C. Infrastruktur .....	49
D. Jalan.....	51
BAB III_GAMBARAN UMUM DESA PATUK .....	55
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	55
1. Profil dan Sejarah Desa Patuk .....	55
2. Visi Misi Kalurahan Patuk.....	57
3. Pembagian Wilayah Desa Patuk .....	58
4. DEMOGRAFI.....	61
B. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA .....	68
C. POTENSI DAN MASALAH .....	70
1. POTENSI.....	70
2. MASALAH.....	73
3. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA.....	89
BAB IV_PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM	
PEMBANGUNAN FISIK DESA PATUK .....	96
A. Analisis Representasi Partisipasi Masyarakat .....	96
B. Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam	
Pembangunan Desa .....	103
1. Perencanaan .....	103
2. Pelaksanaan.....	128
BAB V_FAKTOR MEMPENGARUHI PARTISIPASI	
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA	
PATUK.....	145

A. Faktor Pendorong .....	145
B. Faktor Penghambat .....	150
BAB VI PENUTUP .....	154
A. Kesimpulan.....	154
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA .....	159
LAMPIRAN .....	166

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tahapan analisis data kualitatif.....	40
Tabel 3. 1 Jenis Kelamin.....	61
Tabel 3. 2 Golongan Usia .....	61
Tabel 3. 3 Pekerjaan/Mata Pencaharian.....	62
Tabel 3. 4 Lulusan Pendidikan Umum .....	63
Tabel 3. 5 Lulusan Pendidikan Khusus.....	63
Tabel 3. 6 Sarana dan Prasarana .....	66
Tabel 4. 1 Daftar Pembangunan Jalan Desa Patuk 2023 .....	120
Tabel 4. 2 Rancangan RKP Kal Patuk .....	122
Tabel 4. 3 Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 .....	138

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administrasi (kalurahan) Desa Patuk.....	58
Gambar 2 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja .....	69
Gambar 3 Pelaksanaan Partisipasi Tenaga .....	130
Gambar 4 Proses Eevaluasi dan opname Fisik Cor Rabat Jalan Desa .....	144

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan desa memainkan peran penting dalam kebijakan nasional, yang mewujudkan aspirasi dan tujuan negara untuk mendukung pencapaian tujuan nasional sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen ini semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 78 ayat 1 dan 2, yang menggarisbawahi bahwa tujuan utama pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, fokus pembangunan desa meliputi pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi desa, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkesinambungan. Proses pelaksanaan pembangunan desa melibatkan beberapa tahapan meliputi fase perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Potensi tersebut dapat didayagunakan secara optimal.

Menilik pada tahapan pembangunan desa, tahapan perencanaan merupakan tahapan pertama dari proses pelaksanaan pembangunan. Tahap perencanaan memiliki arti penting dan membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui berbagai inisiatif pembangunan alternatif yang selaras dengan karakteristik unik lingkungan desa. Oleh karena itu, rencana pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan maksimal jika benar-benar

memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Guna mewujudkan tujuan ini, sangat penting untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa, terutama dalam kerangka kemajuan desa. (Safaruddin et al., 2023).

Partisipasi aktif masyarakat desa sangat penting untuk keberhasilan proses rencana pembangunan desa. Efektivitas inisiatif semacam itu tidak hanya bergantung pada keahlian pemerintah desa tetapi juga pada meningkatkan kapasitas dan keamanan masyarakat selama pelaksanaan proyek. Melibatkan partisipasi masyarakat memiliki potensi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan memajukan pelaksanaan rencana pembangunan desa. Namun, keterlibatan masyarakat dalam fase perencanaan masih terhambat oleh sikap apatis, kurangnya kesadaran, dan keterbatasan kemampuan individu. Faktor-faktor lainnya seperti kesibukan individu, pandangan masyarakat bahwa keterlibatan tidak diperlukan serta kepercayaan kepada pemerintah desa dan individu tertentu menjadi penyebab utama kekurangan ini (Yunita & Idrus, 2023). Pembatasan sumber daya dan kepemimpinan yang tidak memadai juga menjadi kendala dalam integrasi efektif masyarakat dalam proses perencanaan. (Ikbal & Jabbar, 2019).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan membantu mencakup aspirasi masyarakat dengan tujuan memberdayakan masyarakat sebagai partisipan aktif dalam inisiatif pembangunan sekaligus meningkatkan kesadaran akan masalah dan kebutuhan pembangunan di desa (A'an et al., 2023). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 354, mendorong penyebaran informasi

oleh pemerintah daerah dan mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk terlibat secara aktif. Hal ini bertujuan untuk membentuk lembaga dan proses pengambilan keputusan yang memfasilitasi partisipasi aktif dari kelompok dan organisasi ini, serta mengimplementasikan kegiatan ini yang sesuai dengan ketentuan hukum yang mengikat (Ikbal & Jabbar, 2019).

Strategi implementasi yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola melalui pengembangan potensi partisipasi aktif masyarakat adalah langkah jangka panjang yang memerlukan perencanaan yang matang untuk mendorong masyarakat desa agar berpartisipasi aktif dalam berbagai proses pembangunan infrastruktur terutama di Desa (*Kalurahan*) Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan yang dapat digunakan memanfaatkan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) seiring adanya inisiatif kolaboratif di tingkat desa, menciptakan wadah bagi anggota masyarakat untuk berkontribusi setidaknya dengan memberikan ide atau gagasan yang konstruktif dalam proses perencanaan pembangunan desa (Rachaju et al., 2022).

Masyarakat di Desa Patuk memiliki keunikan tersendiri dan budaya yang sangat kuat, di mana mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Tingkat partisipasi warga ditunjukkan dengan keaktifan mereka dalam musyawarah desa. Namun, pembangunan di desa ini terhambat oleh kurangnya dukungan maksimal dari berbagai lapisan masyarakat (Ismatullah & Mahendra, 2021). Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan inisiatif pembangunan, seperti yang ditunjukkan melalui

partisipasi mereka pada Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) maupun gotong royong penilaian kemajuannya. Keterlibatan ini menjadi indikator kapasitas masyarakat untuk berinisiatif dan memanfaatkan hasil dari upaya pembangunan tersebut. Upaya mempromosikan dan meningkatkan partisipasi krusial bagi pengembang masyarakat untuk memahami kebutuhan asli yang dialami oleh individu dan rakyat desa Irma Purnamasari dalam (Dahliah, 2022).

Masyarakat Desa Patuk terutama Dukuh Ngandong dan Gluntung harus menekankan interaktivitas dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan perlunya memupuk semangat dan kebersamaan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) masyarakat agar desa Patuk dapat meningkatkan sejahtera. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dimaksudkan untuk menghasilkan hasil yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dalam inisiatif pembangunan desa dimulai dari mendapatkan informasi mengenai perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan program. Adanya peran partisipasi dan kerja sama yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat, memungkinkan berkembangnya modal sosial yang sangat penting untuk meningkatkan manajemen pelaksanaan pembangunan di Desa (Darin et al., 2022).

Mengelola pembangunan infrastruktur desa memerlukan pendekatan komprehensif untuk mempertimbangkan menyeluruh terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam upaya mencapai kemajuan desa yang berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam setiap rencana pembangunan merupakan perencanaan pembangunan inklusif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini merupakan tugas yang kompleks pada perencanaan program pembangunan yang berhasil harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan perhatian khusus yang menjadi inti dari program itu sendiri. Karena kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran semakin beragam dan rumit, perencanaan program juga menjadi lebih rumit. Masing-masing target demografis memiliki karakteristik tersendiri. Masyarakat mempunyai berbagai macam tuntutan dan kepentingan kapasitas mereka untuk menganalisis situasi berbeda-beda, begitu pula dengan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan. (Muslim, 2009).

Dalam rangka pembangunan infrastruktur desa di dukuh Gluntung dan Ngandong salah satu dukuh di Ngandong masyarakat telah bergotong royong untuk membangun jalan desa secara swadaya. Proyek ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan rute tujuan, operasi pertanian dan peternakan, serta rute jalan baru menuju kantor layanan pemerintah desa yang baru dibentuk di Dukuh Gluntung Desa (*Kalurahan*) Patuk. Hal ini menekankan pentingnya meningkatkan infrastruktur, terutama di wilayah yang tidak memiliki sistem infrastruktur yang memadai. Upaya untuk mencapai tujuan ini perlu dukungan aktif dari

masyarakat dan pemerintah desa untuk merespon dan mengkomunikasikan keinginan masyarakat. Dukungan ini terutama mencakup pemberian masukan dan saran untuk mempermudah penyampaian aspirasi masyarakat melalui pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa (Ahmad et al., 2023).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) berperan krusial dalam melibatkan warga dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa. Sebagai forum pertemuan usulan masyarakat (*bottom-up*) dengan rencana pemerintah (*top-down*) MUSRENBANG menjembatani aspirasi warga dengan program pembangunan (A'an et al., 2023). Publik memainkan peran yang semakin penting dalam pengambilan keputusan kebijakan seiring dengan berlanjutnya proses demokratisasi di pedesaan. Dalam konteks demokratisasi, partisipasi masyarakat melalui MUSRENBANG menjadi kunci untuk mewujudkan gagasan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Adisasmita, 2006).

Pelibatan masyarakat yang efektif didasarkan pada prinsip bahwa program pembangunan akan menghadapi hambatan jika masyarakat yang bersangkutan tidak terlibat secara aktif dan diberdayakan dalam setiap aspek perencanaan hingga monitoring. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur jalan dan pemupukan keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan yang berfokus pada masyarakat wahyudin sumpeno dalam (Kumala

Dewi et al., 2020). Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa, namun juga sejalan dengan tujuan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat (Ahmad et al., 2023).

Berdasarkan observasi lapangan, peneliti menemukan fenomena terkait pembangunan infrastruktur jalan provinsi dan dampaknya terhadap infrastruktur jalan di sekitar desa (*Kalurahan*) Patuk. Selain manfaat mobilitas yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat, terdapat potensi kapasitas dan sumber daya masyarakat yang dapat dimanfaatkan dari pembangunan infrastruktur fisik ini. Infrastruktur jalan dapat menunjang kegiatan ekonomi dan pengembangan rute tujuan wisata di wilayah desa, sesuai dengan strategi pembangunan yang berfokus pada infrastruktur fisik. Pelibatan masyarakat memberdayakan masyarakat untuk mengatasi persoalan mereka dengan mendorong kemitraan, keterbukaan, kesetaraan, dan tanggung jawab. Hal ini dicapai melalui pengambilan keputusan bersama dalam kerangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) penting untuk merancang solusi yang efektif dan konsisten dengan proses perencanaan pembangunan desa. Berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi sosialisasi, kesempatan, kepemimpinan, dan transformasi sosial budaya. Memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi langkah penting dalam proses pembangunan infrastruktur jalan di Desa (*Kalurahan*) Patuk. Wilayah Desa Patuk akan memperoleh banyak

keuntungan dari keterlibatan aktif dan kontribusi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur, yang akan memberikan dampak signifikan dan menjadi fondasi bagi transformasi pembangunan desa dengan potensi dan karakteristik yang unik (Ismatullah & Mahendra, 2021).

Proses keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada tindakan beberapa orang atau sekelompok orang saja, melainkan merupakan hasil dari sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak yang turut terlibat (Sudianing, 2020). Pentingnya kerjasama dalam konteks pembangunan terkait dengan kompleksitas dan multifasetnya faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan. Keterlibatan masyarakat desa menjadi indikator utama efektivitas inisiatif pembangunan infrastruktur, untuk memastikan bahwa berbagai proyek pembangunan desa selaras dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga dapat membantu menjamin tercapainya tujuan pembangunan. Keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh partisipasi, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial budaya yang menjadi dasar partisipasi masyarakat sebagai potensi yang dapat dimobilisasi melalui rencana pembangunan infrastruktur jalan desa (Penny et al., 2023). Untuk memastikan keberhasilan pembangunan, sangat penting untuk bekerja sama dengan berbagai kelompok dan organisasi untuk menciptakan dampak jangka panjang dan bermanfaat bagi masyarakat Sudiarta dan Redana dalam (Sudianing, 2020).

Pentingnya keterlibatan masyarakat terutama Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Menyikapi penilaian bahwa masyarakat kurang responsif cepat tanggap terbuka dalam menyampaikan tujuan dan gagasan mereka mengenai kebutuhan pembangunan infrastruktur desa di ruang publik, khususnya selama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), ada penekanan baru untuk melibatkan masyarakat dalam melaksanakan rencana pembangunan guna menjamin tercapainya kebutuhan masyarakat. Melalui sesi musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat dapat secara aktif memberikan rekomendasi, memanfaatkan potensi, merencanakan, membuat pilihan, dan mengevaluasi program pembangunan desa, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam perencanaan program pembangunan infrastruktur jalan yang dibutuhkan masyarakat (Mono & Samaloisa, 2022). Guna meningkatkan proses ini, setiap program pemerintah harus disosialisasikan kepada masyarakat, atau masyarakat harus berpartisipasi dalam formulasi perencanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat desa, sehingga pemerintah desa dapat memonitor perkembangan pembangunan infrastruktur desa (Masruri, 2022).

Mekanisme kelembagaan diperlukan untuk mengoordinasikan pembangunan desa, mendorong partisipasi masyarakat, dan mengawasi pengelolaan pembangunan. Mekanisme ini penting karena adanya kendala dalam alokasi sumber daya untuk pembangunan desa. Pendekatan partisipatif bertujuan untuk

mendorong pembangunan yang adil dengan memungkinkan semua lapisan masyarakat terlibat aktif dan mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mencakup kontribusi tenaga kerja, finansial, dan material yang sepadan dengan manfaat yang diterima. Selain itu, partisipasi juga meliputi pemeliharaan hasil pembangunan untuk keberlanjutan manfaatnya. Partisipasi masyarakat diperlukan sejak tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, sesuai semangat otonomi daerah yang menekankan keterlibatan masyarakat. Partisipasi bukan hanya proses, tetapi juga capaian akhir pembangunan desa, yang menunjukkan pendekatan berkelanjutan dan inklusif. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, karena mereka memahami potensi dan kendala wilayahnya. Keterlibatan masyarakat secara proaktif membantu tercapainya tujuan pembangunan desa. Mendorong keterlibatan masyarakat secara proaktif dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan desa, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan inklusif (Latif et al., 2020).

Keterlibatan partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan merupakan elemen kritis dalam mencapai kesuksesan program pembangunan di Desa (*Kalurahan*) Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kemajuan pembangunan desa. Pembangunan desa harus didorong oleh “*inner will*”, suatu kemauan internal masyarakat untuk memberdayakan diri

dan berpartisipasi aktif. Motivasi intrinsik inilah yang didasari oleh kearifan lokal dan pemahaman yang mendalam tentang tantangan pembangunan desa, sehingga sangat menentukan keberhasilan inisiatif pembangunan. Masyarakat khususnya masyarakat Desa Patuk tidak hanya sekedar memberikan masukan program pembangunan, tetapi juga menjadi mitra aktif yang berperan penting dalam merancang program dan menilai efektivitasnya (Rumegang et al., 2021). Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak hanya tergantung pada kapasitas dan kemampuan administratif pemerintah. Lebih dari itu, keterlibatan aktif masyarakat Patuk menjadi faktor penentu dalam melaksanakan skema pembangunan ini (Balak et al., 2021).

Partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor kunci dalam mengatasi hambatan dan kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan inisiatif pembangunan desa. Tanpa keterlibatan optimal dari masyarakat, pencapaian tujuan pembangunan dapat terhambat, sehingga berdampak pada keterlambatan dalam mencapai target yang ditetapkan. Partisipasi masyarakat tidak hanya mengatasi kendala, tetapi juga mendorong perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Mono & Samaloisa, 2022).

Keterkaitan erat antara tanggung jawab masyarakat dan peningkatan partisipasi mereka dalam pembangunan desa merupakan faktor krusial. Pemerintah desa memegang peran sentral dalam memfasilitasi kemitraan yang transparan dan kolaboratif dengan masyarakat, yang menjadi prasyarat utama keberhasilan implementasi program pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat

dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pada forum Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) merupakan indikator signifikan dari pendekatan pembangunan yang inklusif. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kapasitas kelembagaan pemerintah desa, namun juga pada terjaminnya kapabilitas masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan berbagai proyek pembangunan. Namun, keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan masih belum optimal, baik dari segi motivasi, kesadaran, maupun kompetensi individu. Kunci keberhasilan pembangunan desa terletak pada hubungan interaktif yang sinergis antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa perlu menciptakan iklim yang partisipatif, sementara masyarakat harus proaktif dalam memahami kebutuhan desa. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan, dimana kedua belah pihak saling mendukung, mengawasi, dan mengembangkan kapabilitas untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas fokus penelitian dan memudahkan interpretasi data, peneliti mengemukakan dua pertanyaan utama sebagai rumusan masalah. Rumusan masalah ini didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap latar belakang penelitian di atas,

berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik Desa Patuk?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik Desa Patuk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik Desa patuk?
2. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Patuk?

### **D. Manfaat**

1. Manfaat praktis

Bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan gambaran pengetahuan dan informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa (*Kalurahan*) Patuk.

Diharapkan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya akan memperoleh rekomendasi mengenai upaya untuk meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur di Desa (Kalurahan) Patuk melalui keterlibatan masyarakat yang lebih baik.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik bagi peneliti dan mahasiswa

yang mengambil jurusan ilmu politik mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa (*Kalurahan*) Patuk. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur dalam disiplin ilmu politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Temuan dari studi ini dapat menjadi sumber bagi peneliti lain yang ingin mendalami lebih jauh tentang topik terkait seperti konsep partisipasi masyarakat dan pentingnya dalam pembangunan desa. Ini dapat memperluas pemahaman dan wawasan di bidang ilmu politik dengan fokus penelitian yang lebih spesifik.

## **E. LITERATUR REVVIEW**

*Literature Review* dalam skripsi merupakan bagian penting pada penelitian skripsi tentang partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa tentu bukanlah satu-satunya penelitian yang baru. Oleh karenanya Peneliti menyusun *Literature Review* yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini berikut ini beberapa tema yang akan di sorot atau menggambarkan penelitian ini yakni:

### **1. Partisipasi Masyarakat**

kajian mengenai Partisipasi Masyarakat, peneliti memilih 7 artikel terkait sebagai dasar analisis (Ikbal & Jabbar, 2019), (A'an et al., 2023), (Zulfila, 2023), (Setiawan, 2023), (Masruri, 2022), (Sabrina, 2022), (Sudianing, 2020).

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh (A'an et al., 2023) berjudul "*Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten*

*Sambas*". Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena sosial dengan mendeskripsikan variabel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) di Desa Sekura masih rendah, hanya 48% warga yang hadir. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Desa Sekura melibatkan masyarakat secara aktif dalam musrenbangdes. kepada Pemerintah Desa Sekura adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musrenbangdes. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah mengajak lebih banyak warga untuk hadir dalam musyawarah, memberikan ruang bagi tanggapan dan penolakan terhadap program yang ditawarkan, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif dan representatif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zulfila, 2023) berjudul "*ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANGDES (Studi Kasus Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis)*". Penelitian ini membahas rendahnya

tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Berancah. Kendala yang diidentifikasi meliputi kesulitan dalam pengambilan keputusan terkait program prioritas, kurangnya pemahaman masyarakat akan kebutuhan pembangunan, dan keterbatasan dalam analisis kebutuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam dan analisis fenomena sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kurang memperhatikan infrastruktur faktual dan sarana ekonomi di Desa Berancah. Musrenbangdes juga menghadapi kendala seperti kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi dan kekurangan sumber dana. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan Desa Berancah dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar pembangunan desa lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dari perencanaan hingga evaluasi proyek pembangunan sangat vital untuk kesuksesan program-program pembangunan. Perbaikan ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi komprehensif untuk mendukung pembangunan Desa Berancah yang lebih inklusif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ikbal & Jabbar, 2019), yang berjudul "*Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang*". penelitian tersebut membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasi, kuesioner, dan wawancara sebagai metode

pengumpulan data yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kuantitatif dengan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap ada pada kategori “Konsultasi” dengan nilai 81,5% yang menunjukkan kategori yang sangat baik. Namun, pengamatan peneliti menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum berjalan secara maksimal, dengan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Observasi awal juga mengindikasikan bahwa masyarakat hanya cenderung dilibatkan dan melibatkan diri dalam legitimasi agenda kebijakan, namun kurang maksimal pada agenda perumusan dan perencanaan kebijakan, sehingga kebijakan yang lahir cenderung tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan, serta adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini penting karena partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan dengan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian jurnal yang dilakukan (Setiawan, 2023) berjudul “*Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Desa (MUSRENBANG) di Desa Tumbang Bantian*” Kajian Penelitian ini mengfokuskan pada peran krusial perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah serta rencana operasional pemerintah desa dalam

membentuk lanskap sosial-ekonomi di tingkat lokal, dengan studi kasus Desa Tumbang Bantian di Indonesia. Dengan penekanan pada proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), penelitian ini menyoroti peran penting peraturan desa dalam merumuskan dan mengesahkan rencana pembangunan dan kerja pemerintah. Keberhasilan rencana-rencana ini sangat tergantung pada kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat, menciptakan dinamika simbiosis mutualisme dalam pembangunan lokal. Desa Tumbang Bantian menjadi contoh yang mempromosikan lingkungan kolaboratif untuk kemajuan desa. Hubungan timbal balik antara inisiatif pemerintah desa dan keterlibatan aktif masyarakat mencerminkan komitmen terhadap perencanaan partisipatif. Meskipun demikian, kajian ini mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk kurangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan desa dan prioritas kebutuhan mendesak daripada masalah jangka panjang. Dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Tumbang Bantian berjalan dengan baik, tetapi tidak tanpa hambatan. Tantangan tersebut menyoroti perlunya membangun kepercayaan terhadap kepemimpinan, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan menyempurnakan identifikasi masalah. Efektivitas Musrenbangdes menjadi kunci keberhasilan inisiatif pembangunan daerah, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan proses ini di Desa Tumbang Bantian dan desa-desa sejenis.

Penelitian jurnal yang dilakukan (Sabrina, 2022) berjudul *”Strategi Pembangunan Berkelanjutan Saat Itu dalam Otonomi Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat”*. Artikel ini menjelaskan sebuah gagasan untuk menciptakan strategi pembangunan berkelanjutan di era demokrasi lokal yang berbasis partisipasi masyarakat. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan isu yang menjadi tujuan dari pembangunan sosial yang berlangsung untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Di era demokrasi lokal, partisipasi masyarakat sangat menentukan keberlanjutan pembangunan dalam banyak hal. Oleh karena itu, tolok ukur keberhasilan pembangunan di era demokrasi lokal kepada partisipasi masyarakat lokal, namun memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada kepentingan politik pada sistem demokrasi tidak diperkenankan ketika ada campur tangan kepentingan politik. Diperlukan model dan strategi yang berbeda dalam rezim demokrasi, sehingga partisipasi masyarakat harus lebih kuat di era demokrasi dalam prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Solihin dkk berjudul *”upaya pemerintah desa dalam mendorong masyarakat untuk pembangunan desa”* dalam mempromosikan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui implementasi kebijakan dan peraturan. Penggunaan metode partisipatif dapat memberdayakan masyarakat dan memungkinkan mereka untuk memiliki rasa memiliki terhadap proses pembangunan. Berbagai penelitian telah menyoroti dampak positif dari partisipasi masyarakat terhadap

pembangunan perdesaan di Indonesia. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa ketika pemerintah secara aktif mendorong dan mendukung partisipasi masyarakat, maka akan menghasilkan hasil pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudianing (2020), yang berjudul *Fungsi Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Meningkatkan Kinerja Kebijakan Publik di Bidang Pembangunan Daerah*". Penelitian ini membahas tentang peran perencanaan pembangunan partisipatif dalam meningkatkan kinerja kebijakan publik di bidang pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk lebih memahami pentingnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengaruhnya terhadap kinerja kebijakan publik. Pada penemuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif dapat membantu meningkatkan kinerja kebijakan publik di bidang pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat meningkatkan legitimasi kebijakan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan, dan membangun keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Masruri (2022) berjudul *“Peran Kepemimpinan Kepala Kalurahan Tepus untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Kalurahan”*. Penelitian ini membahas peran penting Kepala Kalurahan dalam pengembangan desa di bawah tanggung jawabnya. Penelitian ini menekankan bahwa kemajuan Kalurahan tidak bisa dicapai tanpa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Penelitian bertujuan untuk mengungkap peran Kepala Kalurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, menilai program pembangunan yang sedang berlangsung, serta mengevaluasi kontribusi masyarakat terhadap pelaksanaan program-program di Kalurahan Tepus. Bahwa masyarakat di Kalurahan Tepus bersedia berpartisipasi, meskipun keterlibatan mereka terutama bersifat non-finansial. Pemerintah Kalurahan Tepus menjalankan beragam program fisik dan non-fisik untuk mencapai tujuan pembangunan. Tugas Kepala Kalurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melibatkan teknik keterlibatan non-finansial, seperti melibatkan masyarakat dalam MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), dan berinteraksi secara aktif dengan warga. Penelitian menyoroti perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek merupakan awal dari partisipasi masyarakat di Kalurahan Tepus, tetapi penilaian terhadap tingkat partisipasi masyarakat masih perlu lebih diperjelas atau ditingkatkan. Dengan demikian, studi ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara kepemimpinan Kepala Kalurahan dan partisipasi masyarakat dalam mencapai kemajuan Kalurahan.

## **2. Pembangunan Desa**

kajian mengenai Partisipasi Masyarakat, peneliti memilih 3 artikel terkait sebagai dasar analisis (Dahliah, 2022), (Farida et al., 2022), (Penny et al., 2023)

Penelitian jurnal yang dilakukan (Dahliah, 2022) berjudul “*Analisis Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat kedalam APBD Kabupaten*

*Majene*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses perencanaan partisipatif dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat dalam Penganggaran Daerah. Metode yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif memiliki peran signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah dengan tujuan untuk mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek pembangunan dan alokasi sumber daya. Melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan inisiatif pembangunan memungkinkan pemerintah daerah untuk memastikan responsifnya proyek-proyek tersebut terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi salah satu mekanisme kunci dalam perencanaan pembangunan partisipatif, di mana warga dapat menyuarakan aspirasi dan prioritas mereka. Efektivitas Musrenbang sangat tergantung pada partisipasi masyarakat, transparansi proses pengambilan keputusan, dan responsivitas pejabat daerah terhadap masukan warga. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dapat meningkatkan kesesuaian proyek dengan kebutuhan lokal. Selain itu, penyerapan aspirasi masyarakat dalam penganggaran daerah, seperti APBD, penting untuk memastikan alokasi dana yang sesuai dengan preferensi dan prioritas masyarakat. Dengan demikian, perencanaan pembangunan partisipatif dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam penganggaran daerah merupakan komponen integral dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan.

Diperlukan penelitian dan evaluasi lebih lanjut untuk terus meningkatkan efektivitas pelibatan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan proses penanggulangan.

Penelitian jurnal yang dilakukan (Farida et al., 2022) berjudul “*Pengaruh Pembangunan Desa terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*”. Penelitian tersebut Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembangunan desa terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan dua dimensi bahwa pelayanan dasar dan pelayanan umum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan desa yang lebih efektif dan efisien dalam menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia, terutama di wilayah desa. Penelitian juga menyoroiti bahwa terjadi peningkatan infrastruktur pedesaan melalui alokasi dana desa, fasilitas pelayanan publik dan infrastruktur masih perlu ditingkatkan agar dapat berdampak secara signifikan dalam mengatasi kemiskinan, terutama di daerah pedesaan.

Penelitian jurnal yang dilakukan (Penny et al., 2023) berjudul “*Implementasi Program Pembangunan di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kota Pontianak*” Penelitian ini membahas tentang implementasi program pembangunan di Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kapur telah berhasil melaksanakan berbagai program pembangunan baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Program pembangunan fisik meliputi pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, drainase, jembatan, dan pembuatan barau. Pembangunan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat dalam prosesnya, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam pelaksanaan. Selain itu pembangunan non-fisik yang berfokus pada pembinaan masyarakat. Program ini mencakup pelatihan keterampilan pengolahan makanan dari ikan lele, program kesehatan seperti pemberian makanan tambahan bergizi kepada ibu hamil untuk mencegah stunting, serta program pendidikan yang meliputi pembinaan guru dan pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD). implementasi program pembangunan di Desa Kapur dinilai sukses karena adanya partisipasi aktif dari masyarakat serta strategi yang tepat dari pemerintah desa. Pembangunan ini tidak hanya meningkatkan infrastruktur, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara keseluruhan.

## **F. Teori**

### **A. Partisipasi Masyarakat**

#### **Pengertian Partisipasi**

Istilah "partisipasi" sebenarnya berasal dari bahasa asing, yaitu "*participation*", yang mengacu pada mengikutsertakan pihak lain dalam suatu aktivitas atau program,

(Davis & Newstrom, 2000) Mendefinisikan bahwa, "partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi pada tujuan kelompok dan bertanggung jawab atas partisipasi mereka." Diakui secara luas bahwa partisipasi masyarakat sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk melakukan upaya bersama untuk terlibat secara aktif dalam berbagai aktivitas tersebut.

Partisipatif dengan demikian diartikan sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam segala aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi perubahan. Partisipasi melibatkan masyarakat mengidentifikasi masalah yang ada, mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan, memilih solusi yang tepat, dan berpartisipasi dalam implementasi dan evaluasi tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

Keith Davis dalam (Sastropetro, 1998) mengemukakan beberapa prasyarat esensial untuk mewujudkan partisipasi yang efektif. Prasyarat-prasyarat tersebut meliputi:

- a. Memiliki waktu.
- b. Dana yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan terbatas.
- c. Subjek partisipasi yang diberikan harus memiliki relevansi dengan kebutuhan organisasi.
- d. Memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.

- e. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara timbal balik.
- f. Partisipasi bersifat bebas sesuai kebutuhan.
- g. Ada kebebasan dalam kelompok, tidak ada paksaan atau tekanan.

### Bentuk-bentuk Partisipasi

Keith Davis dalam (Sastropoetro, 1988) yaitu dengan menggolongkan bentuk partisipasi menjadi lima bentuk yaitu:

- 1) Partisipasi pikiran (*psychological participation*): Ini melibatkan kontribusi berupa ide, pendapat, dan pemikiran untuk mengembangkan proyek infrastruktur.
- 2) Partisipasi tenaga (*physical participation*): Ini melibatkan kontribusi fisik dalam pembangunan infrastruktur, seperti bekerja secara langsung di lokasi proyek.
- 3) Partisipasi keahlian (*participation with skill*): Ini melibatkan kontribusi berdasarkan keahlian khusus, seperti ahli teknik atau profesional lainnya yang memberikan pengetahuan dan keahlian mereka dalam proyek infrastruktur.
- 4) Partisipasi barang (*material participation*): Ini melibatkan kontribusi berupa penyediaan bahan atau peralatan yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur.

- 5) Partisipasi uang (*money participation*): Ini melibatkan kontribusi finansial, baik dalam bentuk sumbangan langsung maupun pembayaran pajak, untuk mendukung pembangunan infrastruktur

## **B. Pembangunan**

### **Pengertian Pembangunan**

Dalam perkembangan teori pembangunan, ada tiga gagasan mendasar yang muncul dari berbagai teori yang ada. Pertama, perubahan terlihat sebagai hasil dari interaksi dengan dunia luar, khususnya dengan negara maju. Perubahan ini terjadi ketika negara berkembang mengadopsi tahap perkembangan yang telah dialami oleh negara maju, yang mencakup pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia. Kedua, perubahan yang didorong oleh gesekan dan benturan kepentingan di antara berbagai aktor, seperti kelompok masyarakat dan negara. Perubahan ini muncul dari konflik antara penjajah dan terjajah, antara negara maju dan negara berkembang, atau antara kelompok yang berkuasa dan yang diperintah. Ketiga, perubahan yang berasal bukan dari faktor eksternal melainkan dari dalam komunitas atau masyarakat itu sendiri. Dinamika perubahan dipandu oleh karakteristik internal masyarakat. Meskipun interaksi dengan pihak luar tidak dilarang, namun arah dan indikator pembangunan ditentukan secara internal (Damsar & indryani, 2016).

Menurut Afandi dalam (Mawikere et al., 2023) pembangunan (*development*) merupakan suatu proses multifaset yang mencakup perubahan signifikan dalam struktur sosial, sikap

masyarakat, lembaga-lembaga nasional, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pembangunan berarti serangkaian upaya pembangunan yang disengaja oleh negara dan upaya transformasi menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses untuk mengubah masyarakat ke dalam suatu kondisi yang lebih dekat dengan masyarakat yang diinginkan seperti yang didefinisikan dalam konstitusi. Terdapat dua faktor yang harus diperhatikan dalam proses transformasi ini yakni kesinambungan dan perubahan.

Pembangunan didefinisikan sebagai serangkaian upaya pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan yang dilakukan oleh negara dalam rangka pembinaan bangsa untuk menuju modernitas siagian dalam (Syed Agung Afandi et al., 2022).

### **Pembangunan Desa**

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. Hal ini juga mencakup upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa memegang peranan penting dalam konteks pembangunan nasional. Upaya pembangunan di daerah perdesaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan yang digunakan bersifat berkelanjutan dan berfokus pada potensi serta kemampuan unik yang dimiliki oleh setiap desa. Pelaksanaan pembangunan desa harus selalu terintegrasi dengan pencapaian tujuan pembangunan secara keseluruhan, yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan warga desa yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan..

pembangunan desa diwajibkan untuk mempertahankan keseimbangan yang proporsional antara peran pemerintah dan partisipasi masyarakat. Pemerintah dihadapkan pada tanggung jawabnya untuk menyediakan prasarana-prasarana yang mendasar, sementara aspek-aspek lainnya menumpu pada kapabilitas dan inisiatif masyarakat. Dalam perspektif ini, kerjasama erat antara pemerintah dan masyarakat dianggap sebagai landasan kritis dalam mencapai optimalitas pembangunan desa. Pembangunan desa, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmadi dalam (Meisy M. P. Bidara, 2022), merujuk pada usaha sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan penduduk di wilayah perdesaan. Proses ini melibatkan mekanisme yang merupakan hasil dari kolaborasi antara aspirasi masyarakat desa dan peran pemerintah.

### **C. Infrastruktur**

Infrastruktur memainkan peran penting dalam memungkinkan kegiatan dan pergerakan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional, regional, maupun lokal (Tapi et al., 2024).

Adapun kebutuhan infrastruktur dasar desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori, diantaranya jalan desa, air bersih, listrik, perumahan, dan irigasi.

Fasilitas fisik yang dibuat atau dibutuhkan oleh badan-badan publik untuk kegiatan pemerintah dalam penyediaan air, listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan layanan serupa untuk mendorong tujuan sosial dan ekonomi disebut sebagai infrastruktur diklasifikasikan menurut *American Public Works Association* untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di bidang sosial dan ekonomi, infrastruktur merupakan sebuah sistem fisik (Zalfa et al., 2024).

Cakupan pembangunan infrastruktur terbagi menjadi tiga area utama: pertama peningkatan infrastruktur transportasi di wilayah perdesaan yang bertujuan untuk memperbaiki akses masyarakat termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan tambatan perahu, kedua pengembangan infrastruktur untuk mendukung produktivitas pertanian, terutama sistem irigasi di daerah perdesaan, dan ketiga fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan air minum bersih serta peningkatan fasilitas sanitasi di perdesaan.

Infrastruktur desa yang mendukung aksesibilitas, seperti jalan, dimasukkan dalam kategori infrastruktur, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015, yang didefinisikan sebagai “fasilitas sistem teknis, fisik, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk memberikan layanan

kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktural yang memungkinkan peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial”.

### **Jalan**

Jalan dijelaskan sebagai infrastruktur transportasi darat yang mencakup semua komponen jalan, termasuk struktur tambahan dan fasilitas lalu lintas yang dapat ditempatkan di atas, di bawah, atau di sekitar permukaan tanah atau air. Menurut Undang-Undang No. 38 Republik Indonesia Tahun 2004, ini tidak mencakup jalur kereta api atau jalur kabel. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, jalan didefinisikan sebagai semua segmen jalan, termasuk struktur pendukung, yang digunakan untuk transportasi umum. Kecuali untuk jalur kereta api dan jalur kabel, jalan tersebut dapat terletak di permukaan tanah, di atas atau di bawahnya, atau di atas permukaan air.

#### **Klasifikasi Jalan**

Klasifikasi Jalan Umum di Indonesia disusun untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan jaringan jalan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,

jalan umum dikelompokkan terdiri dari beberapa jenis berikut ini:

- Sistem Jaringan, terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- Fungsi Jalan, terdiri dari Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, Jalan lingkungan.
- Status Jalan, terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa.

- Kelas Jalan, terdiri dari jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.

### **Jalan Desa**

Jaringan jalan desa terdiri dari beberapa jenis berikut ini:

- Jaringan jalan lokal utama, yang menghubungkan distrik pemukiman di desa sekaligus menyediakan akses lokal ke pusat pemerintahan di tingkat kecamatan dan kabupaten.
- Jaringan jalan lokal sekunder, yang menghubungkan satu desa dengan desa lain (sub-wilayah) di dalam desa. Jalan-jalan ini umumnya telah diperkeras permukaannya dengan aspal ataupun (LAPEN) Penetrasi macadam.
- Jalan lingkungan: jalan yang menghubungkan blok atau gang (kampung), biasanya digunakan untuk menghubungkan tempat tinggal atau mengakses sub-wilayah tertentu di dalam kawasan perencanaan. Beberapa dari jalan ini telah diaspal sebagian masih belum diperkeras berupa jalan tanah.

### **Kondisi Infrastruktur Jalan**

Jalan merupakan salah satu infrastruktur penting yang mendukung efektivitas sistem jaringan transportasi dan berfungsi sebagai katalisator perekonomian desa serta menjadi jalur utama bagi mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pembangunan fasilitas jalan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi yang mudah diakses. Kualitas kondisi jalan sangat mempengaruhi konektivitas antar desa

atau kecamatan. Peningkatan infrastruktur jalan antar dukuh serta antara desa satu hal yang mendasar untuk memfasilitasi berbagai konektivitas masyarakat. Secara khusus, jaringan jalan memainkan peran penting dalam membentuk tata ruang desa dan memiliki kaitan yang kuat dengan perkembangan konektivitas aktivitas masyarakat dan dinamika sosial-budaya masyarakat desa.

### **C. Metode penelitian**

#### **Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus secara sistematis dan terarah untuk mendalami suatu topik dengan tujuan mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai solusi atau jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2021), berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretivisme. Pendekatan-pendekatan penelitian ini ideal untuk mengkaji fenomena pada objek yang bersifat alamiah sehingga peneliti bertindak selaku instrumen utama serta hasil penemuan penelitiannya lebih terfokus terhadap pemaknaan ketimbang generalisasi. Tujuan penelitian kualitatif yakni guna memahami fenomena yang menarik secara detail mengenai subjek penelitian melalui penggunaan dekripsi dan gambaran yang holistik fenomena peristiwa tertentu (Moleong, 2007).

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metodologi studi kasus. Metodologi studi kasus menurut Cresswell (2014), merupakan strategi penelitian yang berusaha mengikuti peristiwa secara cermat dengan mengumpulkan data

menggunakan berbagai teknik. Penulis dapat menganalisis masalah strategis yang berasal dari data yang dikumpulkan selama fase penelitian dengan menggunakan metode ini.

### **Sumber dan Jenis data**

jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini yaitu sumber data primer dan sekunder.

- **Data primer**

menurut (Sugiyono, 2021) merupakan data utama atau prinsipal yang secara langsung memberikan data kepada peneliti mengumpulkan data. Penulis melakukan pengumpulan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) secara langsung dengan narasumber pihak pertama yaitu perangkat desa, ketua RT/RW, karang taruna dan masyarakat desa Patuk.

- **Data sekunder**

Data sekunder ialah informasi yang dikumpulkan melalui perantara pihak ketiga atau dokumen yang sudah ada, bukan langsung dari peneliti. Data ini biasanya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersimpan dalam bentuk arsip, baik milik pemerintah desa. Data sekunder dikumpulkan dalam rangka penelitian ini dari berbagai sumber, termasuk namun tidak terbatas pada data yang dimiliki oleh pemerintah desa informasi mengenai program pembangunan infrastruktur desa.

Jurnal ilmiah, artikel, buku, koran, dan sumber informasi lain yang terkait dengan topik penelitian

digunakan sebagai sumber data sekunder. Data ini diperoleh dan diambil untuk memberikan landasan kerangka pemikiran, membantu analisis dan menutupi kekurangan informasi dalam penelitian ini. ko

## **Teknik Pengumpulan Data**

### **Wawancara**

wawancara merupakan salah satu bentuk di mana dua individu terlibat dalam percakapan pewawancara bertindak mengajukan pertanyaan, berinteraksi sengan narasumber yang akan diwawancarai. Teknik wawancara ini termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-depth interview*), yang mana dalam praktiknya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono (2021), metode ini memberikan kebebasan kepada pewawancara untuk mengeksplorasi topik secara mendalam dengan narasumber. Penulis mengumpulkan data, informasi dan deskripsi mengenai subjek penelitian dari berbagai pihak tertentu. Metode wawancara yang digunakan ialah pendekatan terstruktur parsial artinya pertanyaan-pertanyaan tidak ditentukan lebih dahulu sesuai protokol wawancara standar, kemudian peartanyaan tersebut dapat diperluas atau perluasan variasi sesuai dengan situasi dan kondisi tupoksi yang spesifik. Melalui wawancara, peneliti akan memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Patuk yang tidak belum di peeroleh peneliti dari observasi.

Wawancara langsung ini dilakukan dengan wawancara perangkat desa, ketua RT/RW, karang taruna dan masyarakat desa

Patuk. Wawancara akan dilakukan dengan panduan pertanyaan terstruktur untuk mendapatkan pandangan mendalam mengenai strategi partisipasi pembangunan desa yang diterapkan.

### **Observasi**

Observasi dilakukan sebagai upaya untuk mengamati secara langsung pelaksanaan partisipatif dalam pembangunan fisik yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah Desa Patuk. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara yang langsung di lokasi yang sedang diteliti. Pendekatan ini dipilih agar data yang diperoleh dapat lebih komprehensif, informatif, dan akurat, sehingga memberikan gambaran rinci mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tersebut di implementasikan dan peneliti mengamati koneksi peningkatan partisipasi masyarakat bersama pemerintah desa.

Observasi merupakan metode pengamatan langsung terhadap gejala atau kejadian yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks ini, observasi dianggap sebagai teknik yang relevan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pengamatan dilakukan secara sistematis, dengan perencanaan yang matang dan pencatatan data yang terorganisir, serta kontrol terhadap reliabilitas dan validitasnya, sesuai dengan pendapat Dr. Harbani Paslong (2020). Pendekatan ini diharapkan dapat menyediakan wawasan mendalam mengenai pelaksanaan strategi partisipatif pembangunan, mengungkapkan dinamika interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta memberikan dasar informasi yang kuat

untuk analisis dan interpretasi lebih lanjut dalam konteks penelitian ini.

Peneliti menggunakan definisi observasi dari Thorndike dan Hagen dalam (Dr. Harbani Paslong, 2020), khususnya observasi sistematis dan informal. Observasi sistematis melibatkan metode yang terorganisir, terfokus, dan sistematis untuk memastikan data yang dapat dipercaya dan masuk akal. Pendekatan ini menjamin pola observasi yang terstruktur yang memberikan informasi yang tepat dan dapat diandalkan. Sedangkan observasi informal mengacu pada penggunaan catatan anekdot sebagai alat observasi. Catatan anekdot terdiri dari deskripsi faktual tentang peristiwa dan perilaku penting yang dialami oleh subjek dan didokumentasikan oleh peneliti. Metode ini menawarkan fleksibilitas dalam merespons keadaan yang terjadi secara alami, sehingga memungkinkan pengumpulan informasi yang rinci dan kontekstual. Penelitian ini menggabungkan dua pengamatan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur fisik. Pengamatan sistematis memberikan kerangka kerja yang terstruktur, sementara pengamatan informal dengan "*anecdotal records*" menangkap seluk-beluk dan konteks yang mungkin sulit diukur dengan pendekatan terstruktur. Oleh karena itu, integrasi dari kedua jenis pengamatan ini diharapkan dapat menghasilkan kumpulan data yang komprehensif dan terperinci untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

## **Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan sejumlah besar fakta dan data yang terdokumentasikan dalam berbagai bentuk, seperti dokumen, arsip, buku, gambar, dan angka tertulis. (Sugiyono, 2021) menggambarkan bahwa materi dokumentasi berupa laporan dan informasi dapat menjadi penunjang utama dalam melakukan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data yang terhimpun melalui dokumentasi akan dianalisis dengan cara membandingkan temuan yang berasal dari wawancara dan observasi. Hal ini diupayakan untuk meningkatkan kepercayaan dan kualitas penelitian, melibatkan data tambahan seperti foto, karya tulis, maupun dokumen terkait.

dokumentasi ini secara khusus bertujuan untuk memperoleh data sekunder sebagai sumber informasi tambahan. Data yang diperoleh melalui dokumentasi mencakup dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi pembangunan fisik di Desa (*Kalurahan*) Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Dengan memanfaatkan berbagai sumber ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam merancang strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan desa.

## **Teknik Analisis Data**

Menurut (Sugiyono, 2021) analisis data merupakan salah satu proses sistematis dalam mengeksplorasi dan menyusun data yang disimpulkan dari hasil wawancara, catatan observasi langsung, dan

Pengumpulan dokumen. Proses ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam suatu urutan, menjabarkannya ke dalam suatu elemen, memadukan informasi, mengaitkan pola, menentukan signifikansi, dan menghasilkan kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan lancar oleh diri sendiri maupun pihak lain.

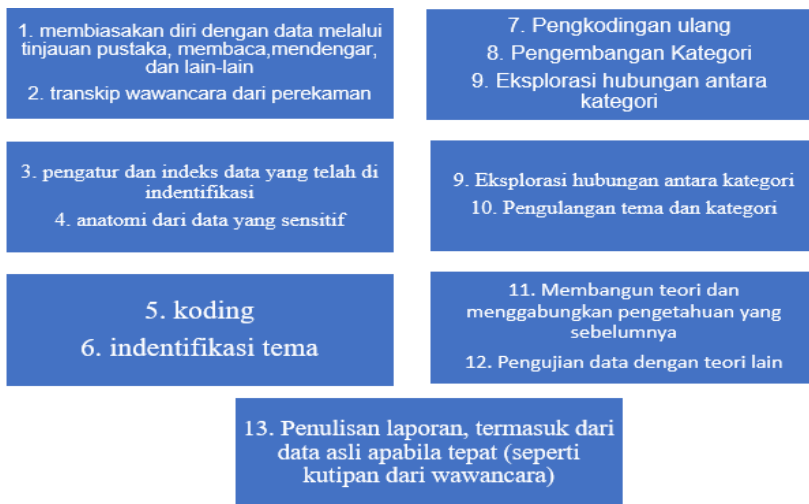
Pendekatan analisis data kualitatif sering kali menggunakan pendekatan induktif, yang membutuhkan eksplorasi terus-menerus (triangulasi) hingga data mencapai titik jenuh. Pemantauan yang terus menerus ini dapat menyebabkan fluktuasi yang besar pada data, sehingga tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi pola yang jelas sebelumnya.

Analisis data kualitatif menggunakan metode induktif, berarti dimulai dengan data yang diperoleh dan kemudian menggunakannya untuk membangun hipotesis. Setelah hipotesis terbentuk data lebih lanjut dikumpulkan secara teratur untuk melihat apakah hipotesis tersebut didukung atau tidak. Jika hipotesis divalidasi melalui pengumpulan data lanjutan dan prosedur triangulasi maka hipotesis tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat teori.(Andriani, Helmin et al., 2020).

Proses analisis data penelitian kualitatif mencakup pemrosesan data, mengorganisasikannya ke dalam segmen-segmen yang koheren, mengklasifikasikannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, menggabungkannya, mengidentifikasi dan mengungkap tema-tema yang muncul berulang-ulang, menggambarkan insight yang krusial, dan memutuskan apa saja yang relevan untuk disampaikan kepada audiens (Almanshur, 2017).

Metode analisis data yang digunakan dalam teknik analisis data penelitian kualitatif ini mengadopsi pendekatan analisis data model Milles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap yang dilakukan secara simultan. Ketiga tahap tersebut mencakup (1) *data reduction*, (2) *data display*, dan (3) pengambilan kesimpulan. Tahapan analisis data kualitatif sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Tahapan analisis data kualitatif**



*Sumber: model Milles dan Huberman*

#### **D. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk membantu memudahkan memahami isi skripsi Sistematika penulisan ini diperlukan dalam beberapa bab, masing-masing dengan tujuan dan fokus tersendiri. Adapun sistematika penulisan skripsi umumnya sebagai berikut:

**Bagian Pertama:** meliputi Halaman Judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Kata Pengantar, Persembahan, Motto, Abstraksi, Daftar Isi, Daftar Gambar, dan Lampiran.

**Bagian Kedua terdiri dari**

**BAB I:**

Bab ini merupakan bagian pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II:**

Kerangka Teori membahas tentang Kerangka Teori secara umum, dengan sub yang membahas Partisipasi Masyarakat, Tingkatan Partisipasi, Bentuk Partisipasi,

**BAB III:**

Bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran objek Penelitian di Desa (*Kalurahan*) Patuk Kabupaten Gunungkidul, Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan latar belakang dan konteks geografis, sosial, ekonomi, dan budaya dari wilayah di Kalurahan Patuk Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul

**BAB IV:**

Bab ini membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik (*Kalurahan*) Desa Patuk Kabupaten Gunungkidul.

**BAB V:**

Faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan fisik di Desa (*Kalurahan*) Patuk Kabupaten Gunungkidul mengkaji data penelitian mengenai Strategi masyarakat

dalam meningkatkan partisipasi pembangunan fisik di Desa (*Kalurahan*) Patuk Kabupaten Gunungkidul.

## **BAB VI:**

Bab ini merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Tujuan dari bab ini ialah untuk memberikan interpretasi terhadap hasil yang diperoleh dan kontribusinya dalam memahami apa yang telah dicapai dalam penelitian ini.

**Bagian Terakhir** yaitu Bagian Lampiran, mencakup Daftar Pustaka dan Lampiran yang relevan dengan penelitian.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Partisipasi Masyarakat**

##### **1. Pengertian Partisipasi**

Istilah "partisipasi" sebenarnya berasal dari bahasa asing, yaitu "*participation*", yang mengacu pada mengikutsertakan pihak lain dalam suatu aktivitas atau program,

(Davis & Newstrom, 2000) Mendefinisikan bahwa, "partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi pada tujuan kelompok dan bertanggung jawab atas partisipasi mereka." Diakui secara luas bahwa partisipasi masyarakat sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk melakukan upaya bersama untuk terlibat secara aktif dalam berbagai aktivitas tersebut.

Partisipatif dengan demikian diartikan sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam segala aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi perubahan. Partisipasi melibatkan masyarakat mengidentifikasi masalah yang ada, mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan, memilih solusi yang tepat, dan berpartisipasi dalam implementasi dan

evaluasi tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

## **2. Efektivitas Partisipasi**

Keith Davis dalam (Sastropetro, 1998) mengemukakan beberapa prasyarat esensial untuk mewujudkan partisipasi yang efektif. Prasyarat-prasyarat tersebut meliputi:

- 1) Memiliki waktu.
- 2) Dana yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan terbatas.
- 3) Subjek partisipasi yang diberikan harus memiliki relevansi dengan kebutuhan organisasi.
- 4) Memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.
- 5) Memiliki kemampuan berkomunikasi secara timbal balik.
- 6) Partisipasi bersifat bebas sesuai kebutuhan.
- 7) Ada kebebasan dalam kelompok, tidak ada paksaan atau tekanan.

## **3. Ciri-ciri partisipasi**

Mengacu pada pandangan Keith Davis dalam (T. Ndarha) menyatakan bahwa terdapat tiga karakteristik utama partisipasi yakni sebagai berikut:

- 1) Titik Berat pada Partisipasi Mental dan Emosional: Partisipasi melibatkan keterlibatan mental dan emosional, bukan sekadar kehadiran fisik. Kehadiran secara pribadi dalam suatu kelompok diperlukan, dan

tanpa keterlibatan mental dan emosional, tidak dapat dianggap sebagai partisipasi yang sebenarnya.

- 2) Kesiediaan untuk Memberikan Kontribusi: Partisipasi melibatkan keinginan untuk memberikan kontribusi terhadap tujuan kelompok atau organisasi. Kontribusi tersebut dapat berupa jasa, barang, uang, pemikiran, atau keterampilan. Setiap bentuk kontribusi dihargai dan penting untuk kemajuan bersama.
- 3) Keberanian untuk Menerima Tanggung Jawab: Partisipasi juga mencakup kesiediaan untuk menerima tanggung jawab terhadap usaha atau organisasi. Ini berarti anggota bersedia mengambil bagian dalam proses pertanggungjawaban dan bertanggung jawab atas hasil usaha bersama.

#### **4. Bentuk-bentuk Partisipasi**

Keith Davis dalam (Sastropetro, 1988) yaitu dengan menggolongkan bentuk partisipasi menjadi lima bentuk yaitu:

- a. Partisipasi pikiran (*psychological participation*): Ini melibatkan kontribusi berupa ide, pendapat, dan pemikiran untuk mengembangkan proyek infrastruktur.
- b. Partisipasi tenaga (*physical participation*): Ini melibatkan kontribusi fisik dalam pembangunan infrastruktur, seperti bekerja secara langsung di lokasi proyek.

- c. Partisipasi keahlian (*participation with skill*): Ini melibatkan kontribusi berdasarkan keahlian khusus, seperti ahli teknik atau profesional lainnya yang memberikan pengetahuan dan keahlian mereka dalam proyek infrastruktur.
- d. Partisipasi barang (*material participation*): Ini melibatkan kontribusi berupa penyediaan bahan atau peralatan yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur.
- e. Partisipasi uang (*money participation*): Ini melibatkan kontribusi finansial, baik dalam bentuk sumbangan langsung maupun pembayaran pajak, untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

## **B. Pembangunan**

### **1. Pengertian Pembangunan**

Dalam perkembangan teori pembangunan, ada tiga gagasan mendasar yang muncul dari berbagai teori yang ada. Pertama, perubahan terlihat sebagai hasil dari interaksi dengan dunia luar, khususnya dengan negara maju. Perubahan ini terjadi ketika negara berkembang mengadopsi tahap perkembangan yang telah dialami oleh negara maju, yang mencakup pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia. Kedua, perubahan yang didorong oleh gesekan dan benturan kepentingan di antara berbagai aktor, seperti kelompok masyarakat dan negara. Perubahan ini muncul dari konflik antara penjajah dan terjajah, antara

negara maju dan negara berkembang, atau antara kelompok yang berkuasa dan yang diperintah. Ketiga, perubahan yang berasal bukan dari faktor eksternal melainkan dari dalam komunitas atau masyarakat itu sendiri. Dinamika perubahan dipandu oleh karakteristik internal masyarakat. Meskipun interaksi dengan pihak luar tidak dilarang, namun arah dan indikator pembangunan ditentukan secara internal (Damsar & indryani, 2016).

Menurut Afandi dalam (Mawikere et al., 2023) pembangunan (*development*) merupakan suatu proses multifaset yang mencakup perubahan signifikan dalam struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pembangunan berarti serangkaian upaya pembangunan yang disengaja oleh negara dan upaya transformasi menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses untuk mengubah masyarakat ke dalam suatu kondisi yang lebih dekat dengan masyarakat yang diinginkan seperti yang didefinisikan dalam konstitusi. Terdapat dua faktor yang harus diperhatikan dalam proses transformasi ini yakni kesinambungan dan perubahan.

Pembangunan didefinisikan sebagai serangkaian upaya pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan yang dilakukan oleh negara dalam rangka pembinaan bangsa

untuk menuju modernitas siagian dalam (Syed Agung Afandi et al., 2022).

## **2. Pembangunan Desa**

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. Hal ini juga mencakup upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa memegang peranan penting dalam konteks pembangunan nasional. Upaya pembangunan di daerah perdesaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan yang digunakan bersifat berkelanjutan dan berfokus pada potensi serta kemampuan unik yang dimiliki oleh setiap desa. Pelaksanaan pembangunan desa harus selalu terintegrasi dengan pencapaian tujuan pembangunan secara keseluruhan, yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan warga desa yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

pembangunan desa diwajibkan untuk mempertahankan keseimbangan yang proporsional antara peran pemerintah dan partisipasi masyarakat. Pemerintah

dihadapkan pada tanggung jawabnya untuk menyediakan prasarana-prasarana yang mendasar, sementara aspek-aspek lainnya menumpu pada kapabilitas dan inisiatif masyarakat. Dalam perspektif ini, kerjasama erat antara pemerintah dan masyarakat dianggap sebagai landasan kritis dalam mencapai optimalitas pembangunan desa. Pembangunan desa, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmadi dalam (Meisy M. P. Bidara, 2022), merujuk pada usaha sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan penduduk di wilayah perdesaan. Proses ini melibatkan mekanisme yang merupakan hasil dari kolaborasi antara aspirasi masyarakat desa dan peran pemerintah.

## **C. Infrastruktur**

### **1. Pengertian Infrastruktur**

Infrastruktur memainkan peran penting dalam memungkinkan kegiatan dan pergerakan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional, regional, maupun lokal (Tapi et al., 2024).

Fasilitas fisik yang dibuat atau dibutuhkan oleh badan-badan publik untuk kegiatan pemerintah dalam penyediaan air, listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan layanan serupa untuk mendorong tujuan sosial dan ekonomi disebut sebagai infrastruktur diklasifikasikan menurut *American Public Works Association* untuk memenuhi

kebutuhan dasar manusia di bidang sosial dan ekonomi, infrastruktur merupakan sebuah sistem fisik (Zalfa et al., 2024).

## **2. Pembagian Jenis Infrastruktur**

Adapun kebutuhan infrastruktur dasar desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori, diantaranya jalan desa, air bersih, listrik, perumahan, dan irigasi.

Cakupan pembangunan infrastruktur terbagi menjadi tiga area utama: pertama peningkatan infrastruktur transportasi di wilayah perdesaan yang bertujuan untuk memperbaiki akses masyarakat termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan tambatan perahu, kedua pengembangan infrastruktur untuk mendukung produktivitas pertanian, terutama sistem irigasi di daerah perdesaan, dan ketiga fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan air minum bersih serta peningkatan fasilitas sanitasi di perdesaan.

Infrastruktur desa yang menunjang aksesibilitas, termasuk jalan, diklasifikasikan sebagai infrastruktur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015. Infrastruktur ini diartikan sebagai “fasilitas yang meliputi sistem teknis, fisik, perangkat keras, dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat serta mendukung jaringan struktural

yang memungkinkan peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial”.

## **D. Jalan**

### **1. Pengertian Jalan**

Jalan dijelaskan sebagai infrastruktur transportasi darat yang mencakup semua komponen jalan, termasuk struktur tambahan dan fasilitas lalu lintas yang dapat ditempatkan di atas, di bawah, atau di sekitar permukaan tanah atau air. Menurut Undang-Undang No. 38 Republik Indonesia Tahun 2004, ini tidak mencakup jalur kereta api atau jalur kabel. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, jalan didefinisikan sebagai semua segmen jalan, termasuk struktur pendukung, yang digunakan untuk transportasi umum. Kecuali untuk jalur kereta api dan jalur kabel, jalan tersebut dapat terletak di permukaan tanah, di atas atau di bawahnya, atau di atas permukaan air.

### **2. Pembagian Jenis Infrastruktur Jalan**

Klasifikasi Jalan Umum di Indonesia disusun untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan jaringan jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan umum dikelompokkan terdiri dari beberapa jenis berikut ini:

- Sistem Jaringan, terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

- Fungsi Jalan, terdiri dari Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, Jalan lingkungan.
- Status Jalan, terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa.
- Kelas Jalan, terdiri dari jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.

### **3. Jalan Desa**

Jaringan jalan desa terdiri dari beberapa jenis berikut ini:

- Jaringan jalan lokal utama, yang menghubungkan distrik pemukiman di desa sekaligus menyediakan akses lokal ke pusat pemerintahan di tingkat kecamatan dan kabupaten.
- Jaringan jalan lokal sekunder, yang menghubungkan satu desa dengan desa lain (sub-wilayah) di dalam desa. Jalan-jalan ini umumnya telah diperkeras permukaannya dengan aspal ataupun (LAPEN) Penetrasi macadam.
- Jalan lingkungan: jalan yang menghubungkan blok atau gang (kampung), biasanya digunakan untuk menghubungkan tempat tinggal atau mengakses sub-wilayah tertentu di dalam kawasan perencanaan. Beberapa dari jalan ini telah diaspal sebagian masih belum diperkeras berupa jalan tanah.

### **4. Kondisi Infrastruktur Jalan**

Jalan merupakan salah satu infrastruktur penting yang mendukung efektivitas sistem jaringan transportasi dan berfungsi sebagai katalisator perekonomian desa serta

menjadi jalur utama bagi mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pembangunan fasilitas jalan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi yang mudah diakses. Kualitas kondisi jalan sangat mempengaruhi konektivitas antar desa atau kecamatan. Peningkatan infrastruktur jalan antar dukuh serta antara desa satu hal yang mendasar untuk memfasilitasi berbagai konektivitas masyarakat. Secara khusus, jaringan jalan memainkan peran penting dalam membentuk tata ruang desa dan memiliki kaitan yang kuat dengan perkembangan konektivitas aktivitas masyarakat dan dinamika sosial-budaya masyarakat desa.

Pada tahun 2022 hingga semester 1 2023, telah diamati bahwa kondisi infrastruktur yang berkaitan dengan jalan di Desa masih belum cukup berkembang dengan sebagian besar pembangunan jalan desa baru terealisasi 40% dibangun atau mengalami degradasi yang signifikan. Selain itu, selama periode yang ditandai dengan curah hujan keadaan jalan semakin memburuk, berubah menjadi kombinasi kurang layak dari permukaan licin dan medan berbatu sehingga membuatnya tidak cocok dan di bawah standar yang diperlukan untuk dilalui kendaraan yang aman. Akibatnya, kurangnya pemeliharaan dan pengembangan jalan yang tepat tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan yang cukup besar bagi masyarakat tetapi juga menimbulkan

kekhawatiran kritis mengenai keselamatan dan mobilitas keseluruhan di wilayah desa.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM DESA PATUK

Gambaran mengenai Desa Patuk akan dijelaskan oleh penulis dalam bab ini. Penulis akan menceritakan sejarah terbentuknya Desa Patuk, letak geografis dan kondisi demografis, keadaan sosial, ekonomi dan budaya sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang berada di dalam landscape ini.

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil dan Sejarah Desa Patuk**

*“Suro diro jojoyoningrat, lebur dening pangastuti”* (Ronggowarsito, 1802-1873). Menurut cerita dari sesepuh Desa Patuk, bahwa Desa Patuk sudah berdiri sejak zaman Panembahan Senopati (1831). Tetapi banyak cerita yang berbeda-beda yang mempunyai landasan dan dasar dalam menceritakannya.

Cerita pertama yaitu pada saat zaman Panembahan Senopati mempunyai istri selir yang bernama Roro Ayu Pembayung putri Ki Ageng Giring Kapin Telu, dari perkawinan tersebut dianugerahi putra laki-laki yang bernama Joko Umbaran. Karena dari istri selir, Joko Umbaran tidak tinggal di istana. Panembahan Senopati mengutus kepada Ki Juru Mretani agar Joko Umbaran keluar dari istana. Selanjutnya Ki Juru Mretani berjalan terus semakin jauh menjauhi dari istana ke arah timur. Berjalan melewati hutan luas, sungai besar sampai dengan naik ke

gunung yang berbukit yang dilaluinya. Sesampainya di telaga yang berada diatas gunung tersebut, Ki Juru Mretani beristirahat karena kecapekan dan selama beristirahat Ki Juru Mretani menancapkan Pathok yang terbuat dari kayu dan berkata bahwa tempat ini besok akan menjadi tempat tinggal warga.

Cerita kedua yaitu bahwa Pathok merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Gunungkidul pada saat kepemimpinan KRT. Dirdjodiningrat yaitu Bupati Gunungkidul yang ke 12 (dua belas) yang ditandai dengan “**Pathok**”.

Berikut ini adalah orang-orang yang pernah menduduki jabatan pemimpin Desa Patuk yaitu.

- a. Harjo Pawiro (1808 M – 1950 M), menjadi Lurah pertama pada tahun 1930 M – 1949 M.
- b. Harjo Diguno (1909 M – 1994 M), menjadi Lurah kedua pada tahun 1949 M – 1993 M.
- c. Sudardjo (1947 M – 2003 M), menjadi Lurah ketiga pada tahun 1993 M – 2003 M.
- d. Suwardiyana (1969 M – sekarang), menjadi Lurah keempat pada tahun 2003 M – 2013 M.
- e. Sumarno (1974 M – sekarang), menjadi Lurah kelima pada tahun 2013 M – 2019 M.
- f. Catur Bowo (1962 M – sekarang), menjadi Lurah keenam pada tahun 2020 M – sekarang

## **2. Visi Misi Kalurahan Patuk**

### **Visi :**

"Terselenggaranya pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat desa patuk yang agamis, mandiri, kreatif, unggul dan berbudaya"

### **Misi :**

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab
2. Melaksanakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
3. Melakukan program-program bernuansa keagamaan dan nasional religius
4. meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia Masyarakat Patuk melalui program unggulan
5. Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai penggerak ekonomi desa yang sasarannya adalah peningkatan potensi Sumber Daya Alam Desa Patuk dan kegiatan berbentuk industri kreatif yang sifatnya home industry yang pemasarannya dipasarkan melalui Pasar Desa
6. Melakukan program-program yang bertujuan untuk melestarikan segala bentuk seni dan budaya, baik yang berupa perbanyakan pementasan seni budaya maupun pendidikan budaya non formal dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul

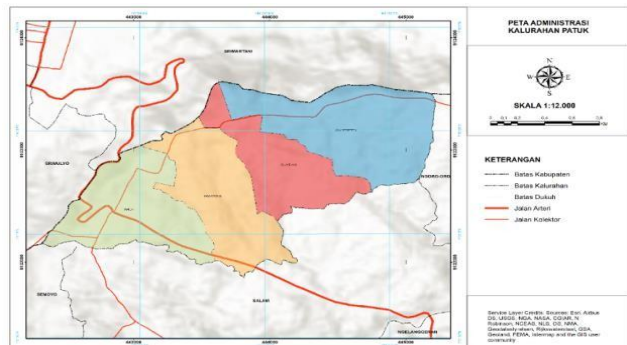
dengan target tujuan generasi muda agar semakin mencintai budaya asli kita

7. Meningkatkan kegiatan di bidang kesehatan dan olahraga untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan sehat serta memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat
8. Meningkatkan peran Pemuda dan Perempuan sebagai salah satu ujung tombak penting bagi kemajuan Desa Patuk yang merupakan pintu gerbang Kabupaten Gunungkidul.

### 3. Pembagian Wilayah Desa Patuk

Desa Patuk adalah salah satu dari 144 desa di Kabupaten Gunungkidul, sebelah barat Yogyakarta, ibu kota. Desa Patuk terletak 21 kilometer sebelah barat kota Kabupaten Gunungkidul. Desa Patuk memiliki luas 267,1470 hektar. Lokasi geografis Desa Patuk adalah sebagai berikut:

**Gambar 1 Peta Administrasi (kalurahan) Desa Patuk**



*Sumber: Pemerintah Desa Patuk*

Batas Wilayah :

- Sebelah Utara Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;
- Sebelah Selatan Desa Salam Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul;
- Sebelah Barat Desa Srimartani dan Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;
- Sebelah Timur Desa Salam dan Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul.

Lokasi geografis desa yang dikenal dengan nama Patuk ini berada di ketinggian 355 MDPL (meter di atas permukaan laut) dengan kemiringan tanah sekitar 35 derajat, yang mengindikasikan medan berat yang menjadi ciri khas daerah ini. Sepanjang tahun, curah hujan tahunan rata-rata yang tercatat di wilayah ini mencapai sekitar 122 milimeter, dan curah hujan ini terdistribusi dalam enam bulan basah yang berbeda, yang berkontribusi pada kondisi iklim secara keseluruhan yang dialami di desa ini. Awal musim hujan biasanya terjadi antara bulan Oktober dan November, sementara musim kemarau biasanya berakhir pada bulan Maret dan April setiap tahunnya, yang menandai peralihan musim yang signifikan. Selama periode puncak curah hujan inilah curah hujan yang paling besar tercatat, yang terjadi terutama antara bulan Desember dan Februari, yang

menyoroti fase kritis dalam siklus hidrologi di daerah tersebut. Suhu udara harian rata-rata yang berlaku di Desa Patuk dilaporkan sekitar 30°C, yang menunjukkan iklim hangat yang dapat mempengaruhi ekosistem lokal dan praktik pertanian. Fitur topografi Desa Patuk ditandai dengan lanskap berbukit yang sebagian besar terdiri dari tanah kuning kemerahan, yang terkenal dengan tekstur tanah liat (Lempungan) sebagai faktor yang dapat memainkan peran penting dalam produktivitas pertanian dan strategi pengolahan tanah.

Orbitasio (Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa) :

- Jarak dari Pusat Pemerintaha Kecamatan  
: 0,2 km.
- Jarak dari Pemerintahan Kabupaten /Kota  
Madya : 21 km.
- Jarak dari Pemerintahan Propinsi  
: 18 km.
- Jarak dari Ibu Kota Negara  
: 536 km

Secara administratif, Desa Patuk terdiri dari 4 (empat) wilayah padukuhan yaitu;

- Padukuhan Patuk terdiri dari 1 Rukun Warga ( RW 001) dan 7 Rukun Tangga (RT 001, RT 002, RT 003, RT 004, RT 005, RT 006, RT 007).

- Padukuhan Ngandong terdiri dari 1 Rukun Warga ( RW 002) dan 5 Rukun Tangga (RT 008, RT 009, RT 010, RT 011, RT 012).
- Padukuhan Gluntug terdiri dari 1 Rukun Warga ( RW 003) dan 6 Rukun Tangga (RT 013, RT 014, RT 015, RT 016, RT 017, RT 018).
- Padukuhan Sumbertetes terdiri dari 1 Rukun Warga ( RW 004) dan 6 Rukun Tangga (RT 019, RT 020, RT 021, RT 022, RT 023, RT 024).

#### 4. DEMOGRAFI

etiap tahunnya, Desa Patuk mengalami pertumbuhan penduduk tahunan yang tidak melebihi 1% dari jumlah penduduknya saat ini.

##### a. Jumlah Penduduk

**Tabel 3. 1 Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	1.461
2	Perempuan	1.984
total		3.445 Jiwa

*Sumber: RPJMDES Desa Patuk 2020-2025*

**Tabel 3. 2 Golongan Usia**

No	Usia	Jumlah Penduduk
1	0-15	670

2	16-65	1.984
3	66-keatas	277
Total		2.931 Jiwa

Sumber: RPJMDES Desa Patuk 2020-2025

**Tabel 3. 3 Pekerjaan/Mata Pencaharian**

No	PERKERJAAN	Jumlah Penduduk
1	PNS	59
2	SWASTA	349
3	TNI/POLRI	4
4	WIRASWASTA/PEDAGANG	317
5	PETANI	276
6	TUKANG	18
7	PETERNAK	3
8	BURUH TANI	24
9	JASA	61
10	LAINYA	259
11	TIDAK BERKERJA	1040
total		2.931 Jiwa

Sumber: RPJMDES Desa Patuk 2020-2025

1) Tingkat Pendidikan Masyarakat

**Tabel 3. 4 Lulusan Pendidikan Umum**

No	Lulusan Pendidikan Umum	Jumlah Penduduk
1	Taman Kanak-kanak	135
2	Sekolah Dasar/ sederajat	503
	SMP/ sederajat	614
3	SMA/SMU	738
4	Akademi/D1-D3	73
5	Sarjana	117
6	Pascasarjana	7
total		2.187 Orang

*Sumber: RPJMDES Desa Patuk 2020-2025*

**Tabel 3. 5 Lulusan Pendidikan Khusus**

No.	Lulusan Pendidikan Khusus	Jumlah Penduduk
1	Pondok Pesantren	135
2	Pendidikan Keagaman	503
	Sekolah Luar Biasa	2
3	Kursus Ketrampilan	17
Total		657 Orang

*Sumber: RPJMDES Desa Patuk 2020-2025*

Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS) : 1.175  
Jiwa , 226 KK

#### **b. Keadaan Sosial**

Keadaan sosial Desa Patuk dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan sosial budaya masyarakatnya yang didominasi oleh pemeluk agama Islam yang hampir mencapai 99% dan kehidupan beragama yang menjadi faktor krusial dalam sosialisasi masyarakat sehingga nilai-nilai toleransi dapat diimplementasikan dan diaplikasikan dengan baik.

Selain itu, akulturasi terhadap praktik-praktik yang ada di masyarakat saat ini tetap penting untuk menjaga nilai-nilai adat istiadat masyarakat yang telah diwarisi dari nenek moyang yang baik. Dalam interaksi sosial masyarakat Desa Patuk, gotong royong terus tumbuh dan berkembang, saling membantu satu sama lain dalam adat istiadat budaya mereka yang dilestarikan sebagai warisan dari generasi pendahulu.

#### **c. Keadaan Ekonomi**

Jaringan transportasi di Desa Patuk memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari warganya, yang terutama mengandalkan sepeda motor untuk mobilitas. Moda transportasi ini lebih disukai karena

kenyamanan dan efisiensinya, memungkinkan anggota komunitas untuk mengakses layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan, serta tempat kerja. Meskipun kendaraan umum beroperasi di sepanjang jalan utama yang menghubungkan Kota Wonosari dan Kota Yogyakarta, ketergantungan pada sepeda motor menunjukkan preferensi untuk opsi transportasi yang lebih fleksibel dan segera.

Kegiatan ekonomi di Patuk sebagian besar didukung oleh layanan transportasi yang dikelola oleh warga, yang memfasilitasi akses pasar dan pengiriman barang serta layanan yang diproduksi secara lokal. Ketergantungan pada layanan transportasi ini menekankan inisiatif dan adaptabilitas komunitas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Infrastruktur jalan yang ada umumnya terawat dengan baik, meningkatkan konektivitas di dalam Desa Patuk dan ke daerah sekitarnya. Namun, penyebutan beberapa bagian jalan yang memerlukan perbaikan menyiratkan peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Menangani area-area ini dapat meningkatkan keselamatan, mengurangi waktu perjalanan, dan memperbaiki aksesibilitas secara keseluruhan bagi penduduk dan pengunjung.

#### d. Sarana Dan Prasarana

Masyarakat pedesaan diharapkan untuk berkembang secara mandiri, dan kemajuan pembangunan harus memiliki pengaruh terhadap perbaikan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang untuk meningkatkan kualitas hidup warga di desa layak.

**Tabel 3. 6 Sarana dan Prasarana**

1	PUKESMAS	1
2	POSKEDES	0
3	UKBM(Posyandu, Poslindes)	4
4	Perpustakaan Desa	1
5	Gedung PAUD	2
6	Gedung TK	4
7	Gedung SD	2
8	Gedung SMP	2
9	Gedung SMA	0
10	Masjid	12
11	Mushola	5

*Sumber: RPJMDES Desa Patuk 2020-2025*

Mengelola sarana dan prasarana menandai fase penting dalam memastikan keberlanjutan upaya pembangunan. Fase ini dimulai dengan mempersiapkan masyarakat untuk bertanggung jawab dalam mengelola program pembangunan secara sukarela. Supaya persiapan ini efektif dilakukan melalui partisipasi aktif masyarakat. Ketika warga masyarakat turut berperan serta maka warga dapat menentukan keputusan yang tepat dan adil dalam pembangunan, menjadi lebih sadar akan hak dan tanggung jawabnya, memenuhi kebutuhannya, dan memanfaatkan sumber daya lokal guna memperbaiki kehidupan mereka.

Untuk memastikan keberhasilan dalam tahap ini, beberapa faktor kunci harus dipertimbangkan:

- a. Kemandirian Masyarakat: Ini adalah landasan dari proses pembangunan. Ketika masyarakat percaya pada kemampuan mereka untuk mengelola urusan mereka sendiri, mereka akan menjadi agen perubahan yang kuat.
- b. Perencanaan Partisipatif: Penting bagi masyarakat untuk mengadopsi kebiasaan perencanaan yang terbuka dan demokratis. Hal ini berarti melibatkan semua orang dalam diskusi tentang kegiatan pembangunan dan membina kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengumpulkan sumber daya secara efektif.
- c. Memperkuat Pemerintah Daerah: Seiring dengan meningkatnya kapasitas pemerintah daerah, pemerintah daerah akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini termasuk menyediakan dana dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Dukungan dari Fasilitator dan Konsultan: Memiliki tenaga ahli yang tersedia - baik atas permintaan masyarakat atau pemerintah daerah - dapat membuat perbedaan yang signifikan. Para fasilitator ini dapat memandu masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan, membantu mereka membangun kemitraan dan mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi yang sukses.

Dengan berfokus pada aspek-aspek ini, kita dapat memberdayakan masyarakat untuk mengambil alih kepemilikan atas perjalanan pembangunan mereka, yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan.

## **B. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA**

### **1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa**

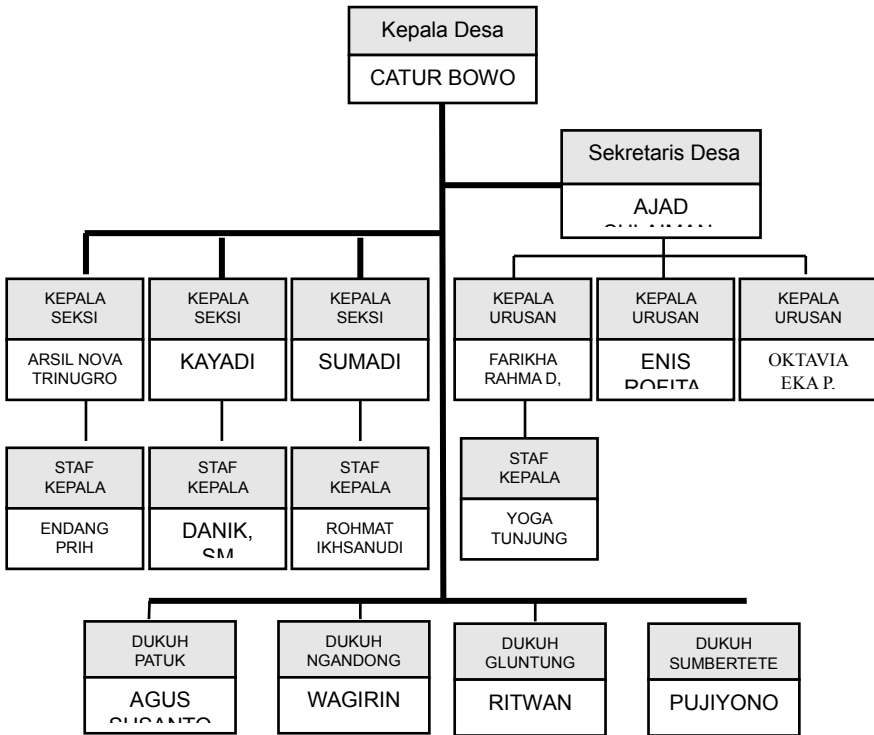
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, tata kelola pemerintahan desa tersusun atas tiga kategori lembaga utama: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan. Undang-undang ini menguraikan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa bertugas untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, dengan mengacu pada tradisi dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam kerangka pemerintahan nasional. Badan ini, yang sering disebut sebagai Kalurahan, dipimpin oleh Kepala Desa, yang memainkan peran penting dalam mengawasi fungsi-fungsi pemerintahan, inisiatif pembangunan, dan urusan masyarakat.

Di sisi lain, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai lembaga demokratis dalam struktur pemerintahan desa. Peran utamanya yaitu bekerja sama dengan Kepala Desa dalam merumuskan Peraturan Desa dan mewakili serta menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD, seperti yang diketahui, terdiri dari anggota yang mewakili berbagai segmen penduduk desa, dipilih melalui musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari para pemimpin

lembaga kemasyarakatan, pemuka adat, profesional, tokoh agama, dan anggota masyarakat yang berpengaruh. Tanggung jawab BPD termasuk menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan ditanggapi.

**Gambar 2 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Patuk**



## **C. POTENSI DAN MASALAH**

### **1. POTENSI**

#### **a. Sumber Daya Alam**

Desa Patuk memiliki topografi yang beragam yang meliputi daerah datar dan pegunungan. Perekonomian desa ini terutama ditopang oleh kegiatan pertanian dan perkebunan. Dalam konteks ini, beberapa jenis tanaman telah terbukti sangat produktif, termasuk palawija seperti jagung, kacang tanah, dan singkong, serta varietas buah-buahan seperti rambutan, durian, dan buah-buahan tropis lainnya.

Sumber daya alam yang tersedia di Desa Patuk memainkan peran penting dalam menopang kehidupan berbagai organisme, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Di antara sumber daya alam tersebut, air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan. Namun, pada musim kemarau yang berkepanjangan, pasokan air di Desa Patuk menghadapi tantangan yang cukup besar.

Kedadaan potensi sumber daya alam di Desa Patuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1) Lahan Pertanian**

Lahan pertanian yang dimiliki Desa Patuk sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan ( $\pm 90\%$ ) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan.

Rincian penggunaan lahan/tanah adalah sebagai berikut:

- Sawah (tadah hujan) : 14,470 Ha
- Tegall atau kebun : 184,661 Ha
- Pekarangan : 14,817 Ha
- Lain-lainnya : 53,199 Ha

## 2) Hutan

Hutan di desa Patuk yaitu hutan rakyat yang merupakan tanah milik pribadi rakyat seluas 32.582,7 hektar dan ditumbuhi pohon jati, sengon, mahoni, sono keling, dan pohon lainnya.

## 3) Flora dan Fauna

Beberapa jenis kegiatan perekonomian masyarakat didalam bidang pertanian yaitu;

- a. Tanaman musiman antara lain, meliputi padi dan palawija (ketela, jagung, kacang tanah, kedelai dan macam-macam polo kependem lainnya).
- b. Tanaman tahunan antara lain, meliputi tanaman buah-buahan (coklat/kakao, durian, kelapa, rambutan, jambu, sirsak, mlinjo, nangka dan lainnya) dan tanaman kayu-kayuan (jati, sengon, sono keling, mahoni dan lainnya)
- c. Tanaman dibawah tegakaan, meliputi tanaman herbal keluarga (jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, kencur, serai dan lainnya).

Derkuku, kuthilang, kuntul, ayam alas, sriti, luwak, ular, kelelawar, dan satwa liar lainnya masih dapat dilihat hingga saat ini. Ikan lele, udang, wader, gurame, mujair, dan hewan air lainnya juga

masih dapat dilihat. Selain itu, Desa Patuk merupakan salah satu tempat di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki potensi alam berupa dataran tinggi yang memungkinkan kita untuk menikmati luasnya lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dari ketinggian.

#### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memainkan peran penting dalam pembangunan desa. Perbandingan demografi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak daripada laki-laki, meskipun perbedaannya tidak signifikan. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, lebih dari 60% penduduk Desa Patuk termasuk dalam kategori usia produktif. Penduduk usia produktif ini merupakan aset utama bagi kemajuan Desa Patuk. Masyarakat menunjukkan tingkat keterlibatan yang sangat tinggi dalam memperoleh pendidikan dasar, seperti yang terlihat dalam statistik pencapaian pendidikan, dengan jumlah lulusan universitas yang cukup banyak di wilayah Desa Patuk.

#### b. Potensi Kelembagaan dan Organisasi

Kelembagaan dan Organisasi di Desa Patuk Saat ini, lembaga dan organisasi di Desa Patuk telah terbentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan spesifik desa. Hal ini terlihat dari kemampuan lembaga-lembaga desa yang telah ada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Partisipasi aktif dari lembaga-lembaga

tersebut sangat penting agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan efektif.

Di Desa Patuk, terdapat berbagai potensi lembaga, termasuk Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna, serta struktur organisasi seperti RW, RT, dan LPMP. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

c. Potensi Sarana dan Prasarana

Fasilitas dan infrastruktur desa sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, agama, sosial, budaya, ekonomi, dan pemerintahan. Di Desa Patuk, meskipun kebutuhan dasar masyarakat telah sebagian besar terpenuhi, kondisi yang ada masih belum sepenuhnya memadai. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur ini menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan desa.

d. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Desa Patuk memiliki potensi sumber daya sosial dan budaya yang terus tumbuh dan berkembang dengan baik, berkat pembinaan yang rutin dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta. Beberapa potensi seni yang ada di desa ini meliputi karawitan, sholawatan, tektek, drama ketropak, reog, dan jathilan.

## MASALAH

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Permasalahan-permasalahan bidang pemerintahan di Desa Patuk:

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
  - a) Belum optimalnya fungsi BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.
  - b) Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahan belum memenuhi aspirasi masyarakat secara optimal
  - c) Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan desa sejalan dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
  - d) Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana teknologi informasi yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.
  - e) Belum optimalnya kerjasama desa dalam rangka peningkatan penanaman modal, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam.

- f) Belum tersusunnya Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan merespon perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- g) Tingkat profesionalisme atau kemampuan aparatur pemerintah desa yang masih perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan pelayanan publik/masyarakat yang transparan, *responsif* dan *akuntable* belum dapat diwujudkan.

2) Sub Bidang Pertanahan

- a) Masih adanya konflik-konflik sengketa tanah.
- b) Masih banyak peralihan hak milik tanah yang tidak melaporkan ke pihak desa.
- c) Belum tertata dengan baik pemanfaatan tanah desa.

3) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Permasalahan-permasalahan bidang pembangunan di Desa Patuk:

1) Sub Bidang Pendidikan

- a) Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana PAUD, TK dan SD;
- b) Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan PAUD, TK dan SD;

- c) Masih rendahnya keterjangkauan pelayanan PAUD;
  - d) Masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
  - e) Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat, dan terbatasnya jumlah koleksi buku perpustakaan.
  - f) Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan desa, disebabkan kurang memadainya sarana prasarana perpustakaan.
- 4) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) Masih belum memadainya pelayanan jaringan transportasi, hal ini didasarkan atas kondisi jalan yang ada, dan masih banyaknya kerusakan.
  - b) Pembangunan Saluran Drainase
    - i. Belum optimalnya saluran drainase untuk mengatasi luapan air.
    - ii. Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara saluran drainase.

- c) Penataan Lingkungan
  - i. Penataan pembangunan lingkungan pemukiman penduduk belum sesuai harapan.
  - ii. Belum terwujudnya pembangunan jalan poros desa atau dusun yang memadai.
- d) Penataan Ruang
  - i. Belum adanya data dan/atau dokumen tentang perencanaan tata ruang desa.
  - ii. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, dan belum optimalnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang.
- e) Perencanaan Pembangunan
  - i. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan desa.
  - ii. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

iii. Masih rendahnya kapasitas/kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan data, belum optimalnya pengembangan serta belum tersedianya *Standar Operating System* Perencanaan.

5) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- a) Masih adaya kualitas rumah yang kurang layak huni, karena sebagian besar merupakan wilayah yang didominasi karakter masyarakat yang bermata pencaharian di bidang pertanian.
- b) Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas pemukiman.
- c) Masih kurangnya pembinaan teknis tentang bangunan dan gedung, dikarenakan terbatasnya SDM yang ada.
- d) Belum adanya norma, standar, pedoman dan manual dalam pencegahan bahaya kebakaran bangunan.
- e) Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni di Desa Patuk.
- f) Masih ada rumah yang belum menikmati listrik dan fasilitas air bersih.

- g) Belum terfasilitasinya warga miskin untuk memiliki rumah yang sehat dan layak huni.
- h) Belum seimbang pertumbuhannya rumah tangga dengan pertumbuhan pengadaan rumah.
  - i) Sampah
    - i. Meningkatnya volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk.
    - ii. Belum adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
  - j) Sumber Daya Air
    - i. Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah, dikarenakan belum tersedianya peta potensi dan rencana pengembangan air tanah.
  - k) Limbah
    - i. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas

sarana sanitasi di pemukiman.

- ii. Belum adanya pembangunan sarana pengelolaan air limbah dalam skala komunitas (kelompok masyarakat).

6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi, informasi dan media massa kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya sistem informasi manajemen pemerintah desa untuk penyebaran informasi pembangunan desa. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana prasarana, serta pengelolaan data dan informasi yang belum optimal.
3. Kurang memadainya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika karena minimnya keterampilan dan keahlian dalam hal penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.
4. Kurang optimalnya penyebarluasan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini disebabkan

karena terbatasnya sarana dan prasarana dibidang teknologi informasi.

5. Belum meratanya pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan.
6. Masih kurangnya fasilitas pengamanan lalu lintas yang ada.
7. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

7) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya kuantitas sampah, terutama sampah plastik.
2. Meningkatnya pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan aktivitas rumah tangga.
3. Meningkatnya pencemaran tanah akibat penggunaan bahan kimia pada kegiatan pertanian.
4. Meningkatnya intensitas pemanasan global (global warming).
5. Terbatasnya luas ruang terbuka hijau.
6. Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat dan instansi pemerintah.

8) Sub Bidang Pariwisata

1. Belum adanya jalinan kemitraan antara pemerintah desa dengan dunia usaha untuk menggali potensi pariwisata di desa.
2. Belum adanya *master plan* pengembangan pariwisata berbasis pertanian (agrowisata) desa.

9) Sub Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Permasalahan-permasalahan bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa di Desa Patuk :

- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
  - a) Belum optimalnya pendidikan politik masyarakat untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran politik bagi warga Negara. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya angka golput dalam beberapa pelaksanaan pemilu.
  - b) Belum optimalnya pengembangan wawasan

kebangsaan dan jati diri bangsa dalam masyarakat. Hal ini ditandai oleh kurangnya pemahaman dasar negara, nasionalisme, hak dan kewajiban warga negara, kesadaran hukum dan penghargaan hak asasi manusia.

- c) Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan, jati diri bangsa dan nasionalisme.
- d) Masih adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
- e) Belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum, penanggulangan penyakit masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat.

- f) Belum optimalnya fungsi perlindungan masyarakat (LINMAS) dalam melaksanakan penanganan awal kamtibmas, penyakit masyarakat (pekat) dan tanggap bencana.
- g) Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana.

10) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- a) Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.
- b) Kurangnya peran lembaga kemasyarakata desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.

11) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan-permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat desa di Desa Patuk

- 1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  - a) Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak. Hal ini ditandai rendahnya presentase perempuan dalam jabatan publik.
  - b) Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik *Focal Point* maupun pelayanan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - c) Masih tingginya kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan.
  - d) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana.

- e) Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan Program KB.
- f) Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan KB.
- g) Masih tingginya presentase keluarga pra-sejahtera dan sejahtera

## 2) Pemberdayaan Masyarakat

- a) Lemahnya kapasitas masyarakat terhadap pemanfaatan potensi sumber daya produktif dalam pengembangan usaha ekonomi produktif relatif sedikit dan belum mampu mengelola dan mengembangkan usaha secara baik.
- b) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
- c) Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam

menunjang pemberdayaan masyarakat.

d) Masih rendahnya peran perempuan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

### 3) Sosial

a) Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terutama fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, penyandang cacat dan wanita rawan sosial ekonomi.

b) Masih tingginya jumlah penduduk miskin.

c) Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial.

d) Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha (*Corporate Social Responcibility/CSR*).

- 4) Ketahanan pangan
- a) Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pangan yang semakin meningkat pula.
  - b) Masih tingginya ketergantungan pada beras menyebabkan tekanan terhadap peningkatan produksi beras semakin tinggi pula.
  - c) Masih adanya kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
  - d) Belum adanya database potensi produksi pangan.
  - e) Masih banyaknya angka kemiskinan yang berpotensi terjadinya kerawanan pangan.
  - f) Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan bergizi seimbang.

- g) Belum optimalnya produktivitas dan mutu produk pangan

## 2. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dirinci setiap misi sebagai berikut:

**Misi 1** : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab serta menjaga hubungan kedekatan dengan masyarakat untuk bersama sama membangun desa dengan tujuan

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab
2. Menjaga hubungan kedekatan dengan masyarakat untuk bersama sama membangun desa Strategi untuk mencapai misi pertama adalah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi.
  - b. Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (*control public*).
3. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.

**Misi 2** : Melaksanakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan peran seluruh bidang pemerintahan desa bersama sama seluruh masyarakat dengan tujuan

mencapai Pembangunan Desa Patuk yang maju dan terukur dengan tujuan :

1. Melaksanakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seluruh bidang pemerintahan desa.
2. Meningkatkan peran seluruh bidang pemerintahan desa bersama sama seluruh masyarakat tujuan mencapai Pembangunan Desa Patuk yang maju dan terukur. Strategi untuk mencapai misi kedua adalah sebagai berikut
  - a. meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga yang ada di Desa.
  - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan Desa.
  - c. sinergitas antara Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Masyarakat dan stakeholder yang ada di Desa dalam mewujudkan Desa Patuk yang maju.

**Misi 3** : Melakukan program-program bernuansa Keagamaan, nasionalis religius yang bertujuan sebagai dasar setiap kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai norma agama sebagai dasar dalam berkehidupan bermasyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan.
2. Menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat dengan pendekatan nilai norma agama untuk mewujudkan

masyarakat dan pemerintahan yang maju dan bermartabat. Strategi untuk mencapai misi ketiga adalah sebagai berikut:

- a. Menggerakkan kegiatan masyarakat dan pemerintahan dengan didasari nilai-nilai norma agama.
- b. Memfasilitasi kegiatan masyarakat dan pemerintahan dalam meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran bahwa agama merupakan dasar kehidupan.
- c. Meningkatkan kesadaran nasionalisme dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara.

**Misi 4** : Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Patuk melalui salah satu program unggulan yaitu Warga Kreatif, Warga Inovatif dan Warga Dinamis yang bertujuan umum untuk meningkatkan kesejahteraan warga dengan tujuan.

1. Meningkatkan potensi sumber daya manusia masyarakat Desa Patuk untuk maju dan mandiri.
2. Memberi kesempatan kepada masyarakat agar menjadi masyarakat yang kreatif, inovatif dan dinamis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi untuk mencapai misi keempat adalah sebagai berikut
  - a. Meningkatkan kemampuan dan menggali potensi sumber daya manusia masyarakat Desa Patuk.
  - b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Patuk untuk berekreasi dengan kemampuan yang

dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraannya dan mampu berdaya saing.

3. Mendorong masyarakat untuk berinovasi menciptakan peluang-peluang kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan sehingga masyarakat lebih dinamis.

**Misi 5** : Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai penggerak ekonomi desa yang sarasannya adalah peningkatan potensi Sumber Daya Alam Desa Patuk dan kegiatan berbentuk industri kreatif yang sifatnya home industry yang pemasarannya dipasarkan melalui Pasar Desa dengan tujuan.

1. Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai penggerak ekonomi desa.
2. Menggali potensi sumber daya alam Desa Patuk melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
3. Meningkatkan industry kreatif masyarakat dengan menampung hasil home industry yang akan diwadahi dan dipasarkan melalui Pasar Desa. Strategi untuk mencapai misi kedua adalah sebagai berikut:
  - a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk menciptakan peluang-peluang kegiatan ekonomi desa yang bisa memajukan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan masyarakat Desa Patuk.

- b. Mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Patuk.
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk meningkatkan industry kreatif masyarakat.
- d. Memfasilitasi produk home industry masyarakat melalui Pasar Desa.

**Misi 6** : Melakukan program-program yang bertujuan untuk melestarikan segala bentuk seni dan budaya, baik yang berupa perbanyak pementasan seni budaya maupun pendidikan budaya non formal dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan target tujuan generasai muda agar semakin mencintai budaya asli kita dengan tujuan.

1. Melestarikan segala bentuk seni dan budaya yang dimiliki Desa Patuk.
2. Menggali potensi seni dan budaya yang dimiliki Desa Patuk.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan melestarikan seni dan budaya asli yang dimiliki Desa Patuk.

Strategi untuk mencapai misi keenam adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya dengan pendekatan kearifan local masyarakat yang sudah ada berkembang.
- b. Memfasilitasi masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk menampilkan hasil kreasi seni dan

budaya masyarakat dengan menggandeng pemerintah daerah maupun stake holder yang ada di Desa Patuk.

- c. Mengenalkan seni dan budaya Desa Patuk melalui kegiatan-kegiatan pertunjukan wisata yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat.
- d. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam bidang seni dan budaya dengan pendidikan formal maupun non formal.

**Misi 7** : Meningkatkan kegiatan di bidang kesehatan dan olahraga untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan sehat serta memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan tujuan :

1. Meningkatkan kegiatan di bidang kesehatan dan olahraga untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan sehat.
2. Memberikan kebutuhan layanan dasar kesehatan kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan sehat. Strategi untuk mencapai misi ketujuh adalah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang kesehatan u/ntuk berperilaku hidup sehat.
  - b. Meningkatkan peran kader kesehatan masyarakat untuk memberikan edukasi dan pendampingan untuk berperilaku hidup sehat di masyarakat.
  - c. Memberikan dukungan kegiatan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan masyarakat

untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan sehat.

**Misi 8** : Meningkatkan peran Pemuda dan Perempuan sebagai salah satu ujung tombak penting bagi kemajuan Desa Patuk yang merupakan pintu gerbang Kabupaten Gunungkidul dengan tujuan:

1. Meningkatkan peran pemuda sebagai salah satu ujung tombak penting bagi kemajuan Desa Patuk.
2. Meningkatkan peran perempuan dalam kegiatan pembangunan desa dan masyarakat desa dengan mengedepankan kesetaraan gender. Strategi untuk mencapai misi kedelapan adalah sebagai berikut :
  - a. Memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berkreasi dan berinovasi untuk mengembangkan Desa Patuk.
  - b. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan mengedepankan kesetaraan gender.
  - c. Menggali dan mengembangkan potensi pemuda Desa Patuk agar berdaya guna saing.

## **BAB IV**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA PATUK**

Bab ini menjelaskan analisis data temuan peneliti saat di lapangan yang berkaitan dengan pembahasan pada bab ini yaitu mengenai partisipasi masyarakat dalam Pembangunan fisik Desa (*Kalurahan*) Patuk. Penelitian diolah dengan analisis data pendekatan induktif (triangulasi) dan pengumpulan data temuan fakta yang ada di lapangan dengan melalui observasi, wawancara kepada narasumber serta dokumentasi terkait pada saat di lokasi.

Wawancara digunakan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, yang memberikan informasi yang akurat dan mendalam terkait di lokasi penelitian. Observasi. Observasi lapangan akan dilakukan dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan dari berbagai informan. Informan narasumber meliputi aparatur desa, perangkat RT, serta masyarakat desa turut teribat dalam pembangunan fisik Desa (*Kalurahan*) Patuk.

#### **A. Analisis Representasi Partisipasi Masyarakat**

Dalam ranah kehidupan sosial masyarakat desa, desa menyanggahkan kondisi sosial idiosinkratis yang terbentuk atas dasar jaringan peristiwa, norma, nilai budaya, dan hubungan saling terkait antar masyarakat desa. Hal ini ditampilkan melalui berbagai ciri khas kuat berpegang pada tradisi masyarakat, sementara yang lainnya lebih menekankan pada hirarki kepentingan sosial yang berbeda. Masing-masing desa ditandai oleh faktor historis, budaya,

sosial, dan kearifan lokal tertentu. Elevasi sosial ini mencakup struktur sosial, tradisi, dan pola interaksi antar masyarakat. Setiap desa di Kecamatan (*Kapanewon*) Patuk memiliki struktural kehidupan sosial masyarakat yang khas, terlihat dari berbagai hal mencakup hirarki sosial, sistem kekerabatan, dan tingkat kohesi sosial dalam masyarakat. Ini tercermin melalui ciri-ciri khas terutama tradisi gotong royong mengajak semua anggota masyarakat bekerja sama untuk kepentingan bersama, sementara desa lain juga ada mempertahankan struktur yang lebih formal dengan peran yang jelas berdasarkan posisi sosial atau profesi mereka. Selain itu, budaya masyarakat desa mencakup aturan, kepercayaan, dan praktik yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Kemajemukan kultur di dalam masyarakat desa membentuk identitas tersendiri yang mendorong partisipasi dan ketahanan masyarakat yang berperan sebagai pondasi untuk mempertahankan identitas lokal desa di tengah perubahan sosial. Kondisi sosial dan budaya ini membentuk karakteristik masyarakat desa memengaruhi interaksi mereka, cara mereka menghadapi tantangan, dan beradaptasi dengan berbagai perubahan di sekitarnya. Memahami aspek-aspek historis, adat, dan budaya ini sangat penting untuk mengembangkan pendekatan yang berkelanjutan dan efektif untuk pembangunan desa. Meskipun tradisi yang mengakar kuat memberikan stabilitas penyertaan perspektif yang beragam semakin penting untuk menciptakan masyarakat yang hidup dan berkembang yang dapat menavigasi kompleksitas tantangan di era modern.

Keberhasilan suatu proses pembangunan secara inheren terkait dengan keterlibatan aktif anggota masyarakat, baik secara kolektif sebagai suatu sistem maupun secara individual, karena mereka memainkan peran penting dalam lintasan pembangunan yang dinamis. Pembangunan pada dasarnya berusaha untuk menghasilkan masyarakat yang makmur, yang berarti bahwa komunitas Desa Patuk (Kalurahan) bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalannya, selain entitas pemerintah. Untuk mencapai pembangunan desa yang memenuhi kebutuhan masyarakat, semua pemangku kepentingan desa harus secara aktif terlibat dalam semua tahap proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga evaluasi.

Pembangunan dapat dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat, dengan melibatkan individu dalam mengidentifikasi persoalan masyarakat, pengambilan keputusan berbasis musyawarah, penyelesaian permasalahan, dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi. Keterlibatan ini lebih dari sekadar kehadiran fisik tetapi juga mencakup pemikiran yang mendalam dan dukungan komitmen yang kuat sehingga menumbuhkan rasa keterlibatan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua RT 7 dan Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (*Kalurahan*) Desa Patuk untuk menggali informasi mengenai awal mula pembangunan jalan di desa tersebut. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

*“Pada awalnya pembangunan jalan ini usulan swadaya warga RT 7 yang terlihat dalam pembangunan jalan di situ. Warga*

*tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak utama aktif dalam gotong royong dan sumbangsiah dalam berbagai bentuk,”* (Riyanta, ketua RT 7)

*“Pembangunan jalan di Desa Patuk dilatarbelakangi adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pembukaan akses antar dukuh, mengingat kondisi jalan yang belum memadai. Selain itu, terdapat kesadaran inisiatif di kalangan masyarakat akan pentingnya jalan yang baik untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan pengembangan desa. Masyarakat menyadari bahwa dengan infrastruktur yang lebih baik, kualitas hidup mereka akan meningkat.”* (Sumadi, Kasasi Kesejahteraan) Pemerintah (Kalurahan) Desa Patuk

Berdasarkan wawancara informan juga pembangunan infrastruktur jalan sangat penting dalam perbaikan akses menghubungkan dukuh-dukuh di (Kalurahan) Desa Patuk karena secara signifikan meningkatkan akses terhadap sarana transportasi dan layanan dasar. Infrastruktur jalan yang baik tidak hanya berkontribusi pada kehidupan masyarakat tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor perekonomian karena menghubungkan wilayah di pedesaan terhadap jaringan akses antar wilayah yang lebih luas. Peningkatan infrastruktur jalan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan memastikan bahwa

penduduk memiliki akses yang efisien terhadap fasilitas dan layanan esensial kehidupan sehari-hari. Pembangunan infrastruktur jalan juga merupakan faktor kunci yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah pedesaan.

Pembangunan infrastruktur jalan menjadi aspek penting dalam mendorong tercapainya pertumbuhan infrastruktur di desa memfasilitasi memudahkan akses dan meningkatkan konektivitas. Terlepas dari keuntungan yang diperoleh dari sektor perekonomian peningkatan infrastruktur jalan dapat secara signifikan mempengaruhi terhadap kondisi sosial masyarakat Desa (*Kalurahan*) Patuk. Di samping itu, peningkatan pembangunan infrastruktur jalan juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Peningkatan jalan dapat mendorong integrasi sosial dengan menghubungkan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas akses jalan yang memadai sehingga mendorong kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan jalan perlu dilakukan audit kelayakan infrastruktur untuk memastikan bahwa semua aspek telah sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan:

*“Memang benar kondisi infrastruktur jalan ini kami pada saat tahun itu sangat kurang perlu peningkatan sehingga kami sebagai masyarakat harus proaktif dalam mendorong proses*

*pembangunan bersama  
pemerintah kalurahan”  
(Masyarakat Desa)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Desa (*Kalurahan*) Patuk, Kabupaten Gunungkidul kondisi infrastruktur jalan di desa tersebut membutuhkan perbaikan. Masyarakat mengakui bahwa infrastruktur yang ada pada tahun sblumnya kurang memadai dan perlu dilakukan peningkatan. Kesadaran akan perlunya pembangunan infrastruktur memotivasi masyarakat untuk mengambil tindakan ketimbang hanya menunggu intrusi dari pemerintah desa.

Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan karena masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai partisipan aktif. Masyarakat telah berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah (*Kalurahan*) Desa Patuk untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur jalan desa. Hal ini menunjukkan semangat gotong royong dan pemahaman bersama tentang nilai pembangunan berkelanjutan. Pendekatan perencanaan partisipasi Desa (*Kalurahan*) Patuk ini menerapkan konsep perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (*bottom-up*) dengan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Masyarakat tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga merumuskan, merencanakan, hingga melaksanakan program pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat desa.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling menentukan dalam proses masyarakat membangun desa. Keberadaan peran keterlibatan masyarakat secara signifikan mempengaruhi

peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa, ketika komponen ini dimiliki oleh masyarakat. Sehingga hasil pembangunan yang dilakukan akan lebih baik dan laboratoris. sumber daya manusia dibentuk oleh berbagai aspek, seperti latar belakang sosial budaya, status sosial dan kesadaran masyarakat dapat mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas agar pelaksanaan program pembangunan di desa dapat berjalan dengan optimal.

Peneliti menyimpulkan pendapat ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riyanta selaku ketua RT 7 menjelaskan:

*“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan di Desa Patuk sangat signifikan, terlihat dari antusiasme warga yang hadir dalam Partisipasi pembangunan dibalik itu di adakan musyawarah tingkat rt bersama pemerintah desa. Setiap musyawarah masyarakat salah satu kunci untuk mendorong keterlibatan menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya, sehingga banyak masukan dan saran konstruktif yang muncul untuk kemajuan pembangunan jalan bersama”*  
(Riyanta, ketua RT 7)

Berdasarkan hasil wawancara penulis memandang bahwa strategi kunci untuk mendorong partisipasi masyarakat Desa (*Kalurahan*) Patuk dalam program pembangunan infrastruktur jalan melalui komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi semacam itu sangat penting untuk mengubah sikap ketidakpedulian awalnya menjadi dukungan serta keterlibatan aktif sehingga menumbuhkan kemitraan yang solid antara perangkat pemerintah desa dan masyarakat. Kolaborasi ini penting mengingat pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan proaktif dari masyarakat dan pemerintah. Sebagai upaya untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal, pendekatan yang bersinergi membangun desa dilakukan dengan melibatkan semua pihak terlibat dalam program pembangunan jalan di Desa (*Kalurahan*) Patuk.

## **B. Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**

### **1. Perencanaan**

Ditetapkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan dasar yang kuat bagi perencanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat secara aktif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Proses musyawarah ini dirancang untuk memprioritaskan dan memprogramkan inisiatif pembangunan yang didanai oleh pendanaan negara berupa dana desa, kontribusi masyarakat, maupun anggaran daerah dengan penekanan pada peningkatan layanan dasar, infrastruktur, peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan

masyarakat. Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam keterlibatan masyarakat didukung oleh peningkatan alokasi dana desa setiap tahunnya. Namun demikian, tantangan seperti distribusi sumber daya yang tidak merata, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan pengangguran masih tetap ada, sehingga menghambat kemajuan. Perencanaan pembangunan sering kali tidak cukup mencerminkan kebutuhan masyarakat desa karena terbatasnya kapasitas aparat desa dan kurangnya evaluasi terhadap pembangunan sebelumnya. Akibatnya, banyak potensi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan hasil pembangunan seringkali tidak sesuai dengan tujuan dan misi yang telah ditetapkan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting karena melibatkan masyarakat dalam menemukan masalah, membuat keputusan, dan menilai perubahan. Tiga langkah strategis diusulkan di Desa Desa (*Kalurahan*) Patuk untuk meningkatkan partisipasi. Pertama, nilai-nilai universal seperti gotong royong dan integritas pengambilan keputusan dapat diinternalisasi melalui forum musyawarah, sesi intrusi, dan kegiatan penjangkauan yang melibatkan para pemangku kepentingan. Kedua, memperkuat partisipasi masyarakat di berbagai tingkat kelembagaan untuk membangun kapasitas masyarakat untuk mengadvokasi kepentingannya secara efektif dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, untuk memastikan bahwa dana untuk kegiatan pembangunan dapat diakses oleh masyarakat sangat penting untuk memberikan bantuan anggaran langsung kepada masyarakat secara terbuka.

Kerangka kebijakan pembangunan desa yang ditetapkan oleh undang-undang Desa membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme dan peraturan yang jelas. Meski demikian, pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan peraturan tersebut sangat penting tanpa pengawasan yang memadai tidak mungkin tujuan dari kebijakan tersebut dapat terwujud. Pengalaman partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa (*Kalurahan*) Patuk menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai penerima pembangunan yang pasif, tetapi juga sebagai partisipan aktif yang memiliki kesediaan, kemampuan, kesiapan, kesadaran, motivasi, serta semangat kerja sama sehingga keterlibatan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Melalui partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan dimulai dari perencanaan hingga evaluasi pembangunan desa menjadi lebih terarah, inklusif, dan berkesinambungan, sehingga mampu menjawab tantangan yang ada secara efektif dapat memaksimalkan potensi desa.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Pamong Dukuh Ngandong mengatakan:

*“Belakangan ini, pembangunan infrastruktur di Dukuh Ngandong dirasa kurang memadai kemudian, ada informasi tentang rencana dari pemerintah Kaluraha, dan kami bersama masyarakat dukuh pasti setuju untuk berinisiatif turut andil dalam perencanaan pembangunan jalan desa melalui forum*

*musyawarah yang ada*” (Pamong  
Dukuh Ngandong)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pamong padukuhan Ngandong, terlihat jelas bahwa infrastruktur di desa tersebut menghadapi tantangan yang cukup besar. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan selama ini dianggap kurang memadai, yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan realisasi pembangunan yang telah dilakukan. Hal ini menyoroti perlunya langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur di wilayah tersebut. Menanggapi keadaan ini, pemerintah Kalurahan telah menyusun rencana strategis untuk mengatasi masalah infrastruktur. Rencana tersebut mendapat persetujuan dari masyarakat menyatakan keinginannya untuk terlibat dalam proses perencanaan. Masyarakat menunjukkan semangat partisipatif dengan menunjukkan kesediaan untuk berkontribusi melalui forum musyawarah yang tersedia. Inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan jalan desa menunjukkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Ketimbang menerima kebijakan secara pasif masyarakat berusaha untuk berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan melalui pendekatan musyawarah diharapkan dapat dihasilkan rencana pembangunan infrastruktur yang komprehensif, aspiratif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah desa sangat berkomitmen untuk meningkatkan hasil yang terkait dengan inisiatif pembangunan desa dan ini dicapai dengan menempatkan penekanan signifikan pada peningkatan metrik kinerja yang berkelanjutan penting untuk dicatat bahwa peningkatan

dalam indikator kinerja ini secara langsung terkait dengan peningkatan keadaan kesejahteraan dalam masyarakat, dengan demikian menggarisbawahi peran penting yang dimainkan pada perencanaan yang cermat dan strategis dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Proses perencanaan dilaksanakan melalui prosedur terstruktur dengan cermat yang dilakukan oleh Pemerintah desa yang memerlukan tingkat koordinasi yang cukup besar antara sektor komersial lokal dan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan integratif dan inklusif ini memastikan bahwa program pembangunan tidak semata-mata terstruktur dengan cermat tetapi juga diawasi secara efektif, sehingga menegaskan bahwa pelaksanaannya selaras dengan visi dan misi pembangunan desa.

Efektivitas dan keberhasilan inisiatif pembangunan desa secara keseluruhan sangat bergantung pada partisipasi aktif dari anggota masyarakat itu sendiri. Penting untuk menyadari bahwa setiap upaya perencanaan yang telah dilakukan akan tetap hanya bersifat teoritis dan ilusi jika ada minimnya keterlibatan aktif dari masyarakat dan sektor pemangku kepentingan terkait yang harus bekerja sama dengan otoritas desa selama tahap perencanaan dan pelaksanaan inisiatif pembangunan.

Mengingat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perumusan rencana pembangunan desa menjadi sangat jelas bahwa penciptaan kebijakan pragmatis dan operasional sangat penting. Kebijakan ini dirancang dengan tujuan membina program dan kegiatan yang tidak hanya terbukti berhasil tetapi juga efisien,

bertarget, tepat waktu, dan sangat sesuai dengan konteks geografis dan budaya desa yang spesifik. Selanjutnya, kebijakan ini berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan di antara anggota masyarakat dan mempercepat penyelarasan tujuan pembangunan desa dalam kerangka desain program dan kegiatan, semua sambil memperhatikan norma-norma budaya, pertimbangan etika, dan prinsip-prinsip moral, memastikan hubungan yang koheren dengan visi dan tujuan pembangunan yang lebih luas.

Perencanaan partisipatif dalam pembangunan infrastruktur desa menempatkan penekanan kuat pada keterlibatan aktif anggota masyarakat di setiap fase proses, dimulai dengan analisis menyeluruh terhadap masalah yang ada, yang kemudian menginformasikan pengembangan rencana yang dapat ditindaklanjuti. Keterlibatan ini sering menghasilkan pembentukan atau penguatan kelompok masyarakat di desa menumbuhkan rasa persatuan dan tujuan. Proses pengambilan keputusan dalam kerangka ini memprioritaskan pilihan yang dibuat oleh masyarakat desa sesuai dengan informasi yang tersedia. Setiap tingkat pendekatan perencanaan partisipatif ini tidak hanya membangun dukungan dan kepercayaan yang kuat di dalam masyarakat tetapi juga memperkuat hubungan interpersonal sambil mempersiapkan pembuat keputusan lokal untuk mewujudkan cita-cita kolaboratif dan merangkul keragaman dalam segala bentuknya.

Peneliti menyimpulkan pendapat ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riyanta selaku ketua RT 7 menjelaskan:

*“...kita sebelumnya lakukan secara swadaya bertahap kemudian musyawarah dengan (Lurah) Kepala Desa untuk pelaksanaan pembangunan jalan kemudian diusulkan kepada pemerintah desa untuk menindak lanjut dan akan memasukan dalam rencana kerja supaya pembangunan jalan didanai anggaran desa” (Riyanta selaku ketua RT 7)*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa pertemuan terkait perencanaan pembangunan infrastruktur jalan telah dilakukan sebelumnya menunjukkan pendekatan proaktif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam musyawarah tersebut, pemangku kepentingan yang terlibat secara aktif untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan berbagai kebutuhan dan prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang dianggap penting oleh masyarakat. Hasil dari musyawarah yang ekstensif ini kemudian diformulasikan ke dalam sebuah proposal usulan yang kemudian diserahkan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti dan masuk rencana pemerintah desa (*kalurahan*) akan dikurangkan pendanaan anggaran dalam pelaksanaan inisiatif program pembangunan jalan. Melalui pengajuan rencana optimal yang terperinci diharapkan seluruh relisasi pelaksanaan proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan selaras dengan harapan dan aspirasi sehingga secara signifikan dapat meningkatkan akses masyarakat di desa.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Masyarakat mengatakan:

*"warga telah melaksanakan perencanaan pembangunan secara swadaya dan di sela itu bersama (lurah) kepala desa berbincang bersama setelah itu membawa usulan ini ke forum Musyawarah desa (musrenbang) ini menjadi langkah penting yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pembangunan desa. Tujuan ini agar pemerintah dan masyarakat mengetahui program pembangunan jalan yang direncanakan secara insiatif mendorong pemerintah desa serta memberikan kesempatan kepada insentif anggaran serta masukan program ini terkait yang dianggap prioritas. Semua perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang ada"*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diartikulasikan bahwa proses perencanaan pembangunan di desa dilakukan secara partisipatif dan sistematis. Masyarakat secara swadaya menginisiasi usulan awal dengan merencanakan kebutuhan pembangunan jalan di wilayahnya, kemudian berkoordinasi langsung dengan kepala desa untuk memusyawarahkan usulan yang telah disiapkan perangkat desa (*kalurahan*) Patuk mengkonsolidasikan semua usulan ke forum Musyawarah Desa (MUSRENBANGDES) sebagai titik kritis sebelum pelaksanaan pembangunan desa. Musrenbangdes memiliki

peran strategis sebagai wadah transparansi dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga berbagai usulan program desa terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai dusun dapat tersampaikan secara menyeluruh. Melalui forum ini masyarakat diberi kesempatan untuk mendorong inisiatif kolaboratif bersama pemerintah desa, mengusulkan alokasi anggaran, dan memberikan umpan balik terkait dengan program-program yang dianggap prioritas. Keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku sehingga memastikan adanya pertanggungjawaban dan transparansi dalam pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Sumadi Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (*Kalurahan*) Desa Patuk dan Wagirin Pamong Dukuh Ngandong mengatakan:

*"Setelah diskusi bersama warga yang berinisiatif pembangunan jalan kita masukan usulan ini ke forum musrenbangdes untuk musyawarahkan bersama menyepakati usulan rencana pemka pada pembangunan jalan ini diperluas hingga di dukuh ngandong"* (Sumadi, Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (*Kalurahan*) Desa Patuk)

*"masyarakat di dukuh setuju rencana ini di musyawarah desa dan perwakilan masyarakat juga sepaka usulan perencanaan"*

*pembangunan jalan” (Wagirin  
Pamong Dukuh Ngandong)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (Kalurahan) Desa Patuk dan Wagirin Pamong Dukuh Ngandong, dimungkinkan untuk menggambarkan proses perencanaan strategis pembangunan jalan, yang dilaksanakan dengan cara yang partisipatif dan deliberatif, sehingga memastikan bahwa suara masyarakat setempat terwakili dan dipertimbangkan secara memadai.

Tahap awal dari proses perencanaan ini ditandai dengan diskusi ekstensif yang berlangsung di antara warga yang memiliki inisiatif yang ditujukan untuk pembangunan jalan akses desa. pembangunan kemudian diangkat ke Forum Musyawarah Desa (MUSRENBANGDES) untuk didiskusikan lebih lanjut yang bertujuan untuk mencapai konsensus bersama pihak yang turut andil terlibat. Lingkup pembangunan jalan yang direncanakan tidak hanya terbatas pada area tertentu, melainkan diperluas hingga wilayah Dukuh Ngandong, menunjukkan upaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh warga desa.

Selama proses musyawarah, perlu dicatat bahwa anggota masyarakat yang tinggal di secara aktif berpartisipasi dalam memberikan persetujuan mereka untuk rencana pembangunan jalan yang diusulkan. Perwakilan masyarakat memainkan peran penting dalam terlibat dalam diskusi dan mencapai kesepakatan bersama mengenai berbagai proposal perencanaan pembangunan yang diajukan. Pendekatan khusus ini berfungsi untuk mencontohkan esensi demokrasi lokal,. Selama proses musyawarah perwakilan

masyarakat juga turut aktif dalam mendiskusikan dan menyepakati usulan perencanaan pembangunan. Pendekatan ini mencerminkan semangat demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, setiap usulan dibahas secara transparan dan mendapatkan persetujuan bersama sebelum dilaksanakan pembangunan jalan desa.

Melalui mekanisme Musyawarah Desa (MUSRENBANGDES) yang inklusif ini, pembangunan jalan tidak hanya dipandang sebagai proyek infrastruktur, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat jelas bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Diskusi yang dilakukan oleh warga menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk memperbaiki infrastruktur yang ada, serta keinginan untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan semua pihak, termasuk perwakilan masyarakat, proses musyawarah menjadi lebih demokratis dan mencerminkan aspirasi serta kebutuhan nyata dari masyarakat.

Keputusan untuk memperluas ruang lingkup rencana pembangunan jalan hingga Dukuh Ngandong lebih lanjut menggarisbawahi komitmen untuk memastikan bahwa semua wilayah mendapatkan perhatian yang sama dalam agenda pembangunan. Hal ini Pendekatan strategis ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas bagi penduduk tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan hubungan di antara warga.

Oleh karena itu, pembangunan jalan desa diperkirakan akan memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, yang mencakup dimensi perekonomian dan sosial. Pendekatan ini menjadi contoh bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat memberikan dampak positif terhadap hasil pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif melalui musyawarah yang dilakukan oleh warga lebih jauh mencerminkan kesadaran akut mengenai kekritisan memiliki infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan memastikan keterlibatan aktif semua pihak dalam kerangka pengambilan keputusan, setiap proposal dapat menjalani pertimbangan yang cermat dan diselaraskan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi spesifik masyarakat secara keseluruhan.

Melalui pelaksanaan mekanisme komprehensif dan partisipatif ini, pengembangan infrastruktur jalan dipahami bukan sekadar sebagai upaya teknis yang berfokus pada konstruksi fisik, tetapi sebagai fenomena sosial yang rumit yang memerlukan dan mendorong keterlibatan antusias masyarakat dalam membentuk arah masa depan kemajuan dan perkembangan daerah mereka. Data yang diperoleh dari serangkaian wawancara mendalam telah secara tegas menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya bermanfaat tetapi memang sangat penting di setiap fase perencanaan pembangunan sehingga menekankan perannya yang sangat penting

dalam keberhasilan keseluruhan inisiatif semacam itu. Proses musyawarah berfungsi sebagai platform vital yang memfasilitasi baik badan pemerintah maupun anggota masyarakat dalam mengartikulasikan kesadaran kolektif mengenai pentingnya meningkatkan infrastruktur yang ada sambil sekaligus mendorong semangat niat baik yang mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan kritis yang pada akhirnya memengaruhi kehidupan sehari-hari warga dan kesejahteraan wilayah secara keseluruhan. Melalui partisipasi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mengutamakan keterlibatan perwakilan masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) merangkum kerangka kerja yang lebih demokratis dan secara akurat mencerminkan kebutuhan otentik dan aspirasi sah dari masyarakat sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan kohesif. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pentingnya keterlibatan sipil yang aktif tetapi juga menggambarkan proses musyawarah kolektif dapat menghasilkan hasil yang lebih adil dan setara dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, proses ini menyoroti peran penting yang diperlukan dari aspirasi-aspirasi masyarakat menumbuhkan rasa tanggungjawab dan kepedulian terhadap pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Sumadi Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (*Kalurahan*) mengatakan:

*“...dari beberapa pembangunan jalan diantaranya ada dari swadaya berbagai pihak sebelumnya itu melakukan*

*meninjau lokasi rencana hingga menetapkan pembangunan jalan”*  
(Sumadi, Kasasi Kesejahteraan  
Pemerintah (*Kalurahan*) Desa  
Patuk)

Berdasarkan wawancara dengan Sumadi Kasi Kesejahteraan Pemerintah (*Kalurahan*) Desa Patuk, penulis menemukan bahwa pembangunan jalan di dusun tersebut membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan.

Proses pembangunan dimulai dengan penilaian lokasi yang diusulkan, yang mengindikasikan bahwa persiapan yang matang telah dilakukan sebelum pelaksanaan. Hal ini menunjukkan nilai kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, serta komitmen untuk meningkatkan akses dan kesejahteraan di desa. Selain itu, cara ini juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan desa. Pembangunan jalan yang melibatkan swadaya masyarakat ini juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain yang ingin mengoptimalkan sumber daya lokal. Hal ini dimaksudkan agar dengan melibatkan partisipasi masyarakat rasa kepedulian yang lebih kuat terhadap infrastruktur akan tercipta sehingga menghasilkan komitmen yang lebih besar untuk merawat dan memelihara jalan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kesadaran mereka akan kegiatan pembangunan desa sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya lokal. Keberhasilan program ini dapat digunakan untuk menginspirasi rencana pembangunan serupa di wilayah lain yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah

dan masyarakat. Pembangunan jalan ini, yang melibatkan swadaya masyarakat, memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi lokal. Akses yang lebih baik diproyeksikan akan menghasilkan kemungkinan ekonomi baru dan aktivitas lebih banyak masyarakat desa, terutama di bidang pertanian. Selain itu, infrastruktur kuat dapat menarik perhatian pemerintah untuk meningkatkan konektivitas terhadap perekonomian masyarakat. Melalui metode partisipatif ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga dapat memupuk rasa kebersamaan dan solidaritas yang lebih dalam di antara stakeholder yang ada di desa. Keberhasilan inisiatif ini juga dapat menjadi motivasi bagi masyarakat lain untuk mengadopsi pendekatan serupa yang memprioritaskan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan semua sektor masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Sumadi Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (*Kalurahan*) Desa Patuk dan Riyanta ketua RT 7 mengatakan:

*“...kemudian kita dalam proses pengerasan itu kan perlu di tingkatkan juga peninjauan dan kita usul ke pemerintah kalurahan, kalau besar kita akan diberikan bantuan pendanaan waktu itu dapat bantuan 19 jutaan sekian makanya itu jadi perkerasan sekitar kurang lebih*

*100 meter kali 3 meter Jadi panjang panjangnya 100 meter, lebarannya 3 meter.” (Riyanta, ketua RT 7)*

*“...ada beberapa mas di catatan pemerintah terutama RT 07 patuk hingga cor rabat di dukuh ngandong untuk perencanaan perkerasan secara bertahap 100 m kali tiga meter untuk pendanaan kita kasih dana 19 juta-an RT 07, hingga ratusan juta cor rabat jalan desa dari keseluruhan teralisasi sekitar 40% jalan desa, 100% cor rabat usaha tani mas” (Sumadi, Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (Kalurahan) Desa Patuk)*

Berdasarkan wawancara dengan Sumadi, Kasi Kesejahteraan Pemerintah (Kalurahan) Desa Patuk dan Riyanta ketua RT 7 menjelaskan berdasarkan serangkaian wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sumadi Kasi Kesejahteraan Pemerintah (Kalurahan) Desa Patuk, dan Riyanta Ketua RT 7, pemaparan terperinci mengenai upaya bersama yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur di lingkungan RT 7, khususnya pada proses pengerasan jalan. Bapak Riyanta menjelaskan bahwa proses pengerasan jalan memerlukan kajian menyeluruh dan penyusunan rancangan proposal bersama dengan pemerintah kelurahan dengan menekankan pentingnya pengelolaan bersama dalam pembangunan infrastruktur jalan desa. pada saat itu, diungkapkan bahwa mereka telah berhasil mendapatkan dana sebesar 19 juta-an untuk pengaspalan jalan sepanjang 100 meter dan lebar 3 meter menekankan aspek keuangan

yang tidak terpisahkan dari inisiatif pembangunan tersebut. Bapak Sumadi lebih lanjut berkontribusi dalam diskusi dengan mencatat bahwa sehubungan dengan rencana pembangunan di RT 07 Patuk, ada beberapa pengamatan kritis mengenai pembangunan rabat jalan di daerah yang dikenal sebagai jalur pertanian di Dukuh Gluntung dan Ngandong seperti yang diformulasikan dalam pertemuan Musrenbangdes termasuk rencana strategis untuk melaksanakan pengerasan jalan secara bertahap. Sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk upaya pengerasan jalan di RT 07 di Patuk dilaporkan berjumlah sekitar 19 juta-an, sementara kemajuan pembangunan jalan desa secara keseluruhan diindikasikan telah mencapai sekitar 40%, sangat kontras dengan realisasi pembangunan cor rabat usaha pertanian yang mencapai 100% maka dari keseluruhan pembangunan fisik masih minim dan fokus utama pada pembangunan jalan.

Kompilasi informasi ini berfungsi untuk menjelaskan upaya kolaboratif yang dilakukan antara pemerintah desa dan masyarakat setempat, yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur jalan yang sangat penting untuk mendukung kegiatan aktivitas sehari-hari baik untuk kepentingan publik maupun spektrum yang lebih luas dari keterlibatan masyarakat di desa.

**Tabel 4. 1 Daftar Pembangunan Jalan Desa Patuk 2023**

Tanggal	Kegiatan	Rincian	Volume	Biaya (Rp)	Sumber Dana	
MEI 2023	Jalan	Rabat Jalan (Karya Bakti TNI) Jalan Usaha Tani Ngandong	(150 m ) 385 m x 4 m	91.746.000	Partai NASDEM (Karya Bakti TNI)	
	Perbaikan Jalan	Talud Jalan Baru	39 m <sup>2</sup>	42.000.000	DD	
	Jalan	Pembukaan jalan baru	3 m x 20 m		SWADAYA	
	Jalan	Cor Rabat Gluntung	60 m x 30 m + 30m x 3m	24.990.000	BKK KABUPATEN	
	Jalan	Cor Rabat patuk RT 07	56 x 3 m	19.950.000	BKK KABUPATEN	
	Juni 2024	Jalan	Talud lapangan patuk RT 01	25 m (31,25 m <sup>2</sup> )	32.001.500	DD
		Jalan	Rabat Jalan TPS 3R	100 x 0,10 x 280 x 2	70.154.000	DD

*Sumber: Pemerintah Desa*

Hasil wawancara peneliti dengan Sumadi Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (*Kalurahan*) Desa Patuk mengatakan:

*“...salah satu penetapan rencana pembangunan jalan dan anggaran di bahas pada rencana musyawarah Musrenbangdes/Musrenbangkal juga membahas rencana selanjutnya akan di masukan kedalam rencana Pemerintah (Kalurahan) Desa Patuk....”*  
(Sumadi, Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (*Kalurahan*) Desa Patuk)

Berdasarkan wawancara dengan Sumadi, Kasi Kesejahteraan Pemerintah (*Kalurahan*) Desa Patuk dapat dijelaskan bahwa pemerintah Desa (*Kalurahan*) Patuk menerapkan proses perencanaan yang transparan dan partisipatif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Proses ini dimulai di awal tahun dengan penyampaian informasi transparansi mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dipajang di depan kantor desa dalam bentuk spanduk berisikan laporan realisasi APBDes atau APBKAL. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk memberikan transparansi informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran. APBDes atau APBKAL di tahun berikutnya.

Pada bulan Desember tahun sebelumnya, pemerintah desa merencanakan kegiatan menguraikan secara garis besar kegiatan rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan di tahun berikutnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES), yang biasanya dilaksanakan pada tanggal 30 September paling lambat kemudian digunakan oleh pemerintah desa untuk menentukan prioritas dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Pemerintah desa melakukan MUSRENBANGDES atau MUSRENBANGKAL ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LKMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemerintah kecamatan, serta lembaga lain yang ada di wilayah Kalurahan Patuk.

Pada akhir tahun dan awal tahun mendatang pemerintah desa menyusun serta menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes/APBKAL yang didasarkan pada RKPDes yang telah direncanakan. Proses ini mencerminkan upaya pemerintah desa untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan pendanaan yang tersedia, serta melibatkan

partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan di forum musrenbang. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat terjaga dan masyarakat dapat lebih memahami serta berkontribusi dalam pembangunan desa.

**Tabel 4. 2Rancangan RKP Kal Patuk**

Kategori	Bidang	Kegiatan
Kegiatan Wajib/Rutin	Pemerintahan	Pengadaan Peralatan Kerja
		Pengadaan Peralatan Mebeler
		Pengisian Pamong
		Purna Tugas
Kegiatan 2024	Pemerintahan	Kegiatan bersumber dari DDs
	Pembangunan	Pembangunan/Rehab PAUD Cempaka
		Pengadaan APE PAUD Cempaka
		Pembangunan Gedung Perpustakaan (8x6 m <sup>2</sup> )
		Serapan Guru PAUD
		Pengadaan Seragam Kader
Pembangunan Jalan Desa RT 16/RT 03		

*Website Pemerintah Desa Patuk*

Perencanaan di forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) memerlukan pendapat - pendapat dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa semua pandangan dan kebutuhan pembangunan dipertimbangkan. Menurut (Davis & Newstrom, 2000) partisipasi dalam konteks ini dapat diklasifikasikan sebagai partisipasi pemikiran yang terjadi ketika individu tidak hanya terlibat secara fisik tetapi juga secara pemikiran proses perencanaan.

Partisipasi pikiran merupakan salah satu kontribusi secara aktif melalui ide, pemikiran, dan rekomendasi konstruktif, sehingga setiap anggota masyarakat merasa bahwa mereka memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Forum musrenbang dapat menciptakan rencana pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal dengan melibatkan berbagai kelompok seperti masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini dapat membantu meningkatkan rasa kepedulian dan tanggung jawab masyarakat terhadap tujuan pembangunan. Hasil wawancara peneliti dengan Wagirin Pamong Dukuh Ngandong dan Sumadi Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (*Kalurahan*) Desa Patuk:

*"...ya betul, pemerintah mengundang perwakilan masyarakat dukuh musyawarah menyampaikan dalam musrenbang, Forum ini memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat dan masukan yang mewakili kebutuhan warga desa dan membahas berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk rencana pembangunan jalan desa...."*  
(Wagirin Pamong Dukuh Ngandong)

*"Melalui Musrenbangdes, kami bersama perwakilan yang di undang membahas berbagai program prioritas yang dibutuhkan rancangan RPKP Kal kami bahas bersama dan ditetapkan dalam RKP Kal"*

*termasuk rencana pembangunan jalan desa salah satunya, semua masukan yang diperoleh kami jadikan acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal)”. (Sumadi, Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (Kalurahan) Desa Patuk)*

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa, khususnya melalui forum terstruktur yang dikenal sebagai MUSRENBANGDES, merupakan elemen penting yang mendukung perumusan dan pelaksanaan inisiatif pembangunan yang sangat selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Wagirin Pamong Dukuh Ngandong, pihak pemerintah telah mengambil inisiatif untuk menciptakan wadah bagi perwakilan masyarakat untuk mengartikulasikan perspektif mereka dan memberikan umpan balik yang konstruktif, yang secara efektif merangkum beragam kebutuhan masyarakat desa, terutama dalam kaitannya dengan kemajuan infrastruktur, seperti pembangunan dan perbaikan jalan desa. Hal ini selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sumadi, Kasi Kesejahteraan Desa (*Kalurahan*) Patuk, mengenai pentingnya melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk memprioritaskan program-program yang penting, dan dengan demikian memastikan bahwa musyawarah tersebut menjadi acuan dasar dalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Mekanisme pelibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Kal ini menunjukkan dengan jelas bahwa pelibatan masyarakat tidak hanya sekedar formalitas belaka, namun merupakan komponen

penting dalam perencanaan pembangunan yang baik dan efektif. Melalui pelibatan masyarakat secara aktif dalam dialog dan proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat menjamin bahwa inisiatif yang dibangun benar-benar mencerminkan aspirasi otentik dan tuntutan yang diutarakan oleh masyarakat. Selain itu, masukan (*insight*) dalam forum musyawarah ini memiliki kapasitas yang melekat untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan program pembangunan yang diusulkan sehingga secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan implementasi di lapangan.

Partisipasi aktif anggota masyarakat dalam MUSRENBANGDES tidak hanya menumbuhkan rasa kepemilikan dan akuntabilitas yang mendalam terkait hasil dari inisiatif pembangunan, tetapi juga berfungsi untuk menginspirasi keinginan kolektif untuk, dan meningkatkan efektivitas, program-program yang kemudian diimplementasikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi instansi pemerintah untuk terus berupaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses pembangunan, dengan tujuan akhir untuk membina hubungan yang harmonis dan sinergis antara pemerintah dan masyarakat, demi tercapainya tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa, khususnya melalui forum terstruktur yang dikenal sebagai MUSRENBANGDES, merupakan elemen penting yang mendukung perumusan dan pelaksanaan inisiatif pembangunan yang sangat selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Seperti yang diartikulasikan oleh Wagirin Pamong Dukuh Ngandong,

otoritas pemerintah telah mengambil inisiatif untuk menciptakan jalan bagi perwakilan masyarakat untuk mengartikulasikan perspektif pendapat mereka dan memberikan umpan balik yang konstruktif secara efektif merangkum beragam kebutuhan desa, terutama dalam kaitannya dengan kemajuan infrastruktur, seperti pembangunan infrastruktur fisik dan peningkatan jalan desa. Hal ini selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sumadi, Kasi Kesejahteraan Desa (*Kalurahan*) Patuk, yang menggarisbawahi pentingnya terlibat dalam diskusi musyawarah yang komprehensif untuk memprioritaskan program-program yang penting, dan dengan demikian memastikan bahwa diskusi ini berfungsi sebagai titik acuan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Keterlibatan masyarakat, khususnya dalam hal berbagi pemikiran atau ide, merupakan elemen penting dalam kerangka program pembangunan, seperti yang ditunjukkan oleh sikap proaktif yang ditunjukkan oleh masyarakat (*Kalurahan*) Desa Patuk, yang telah menunjukkan kesiapan yang patut dipuji untuk menyumbangkan ide-ide inovatif selama forum musyawarah desa (MUSRENBANGDES). Bentuk partisipasi yang menekankan pada kontribusi pikiran individu ini memiliki arti yang sama pentingnya dengan dukungan finansial atau material yang sering kali cenderung mendominasi diskusi seputar inisiatif pembangunan desa sehingga menyoroti sifat keterlibatan masyarakat yang beragam.

Masuknya ide atau pikiran inovatif memiliki potensi untuk secara dramatis meningkatkan efektivitas dan keberhasilan keseluruhan program pembangunan yang telah direncanakan dengan

cermat dengan harapan bahwa masukan dari masyarakat yang dimanifestasikan melalui saran dan ide/pikiran akan berfungsi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan hasil dari upaya-upaya pembangunan ini. Kerangka teori Keith Davis mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan kognitif atau investasi pikiran yang dilakukan individu dalam mencapai tujuan serta pertanggungjawaban individu terhadap tujuan yang akan dicapai. Pada ranah penyusunan program pembangunan, konsep partisipasi pemikiran secara komprehensif dapat dipahami sebagai masukan ide, perspektif, atau refleksi penting yang secara kolektif membantu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa (*Kalurahan*) Patuk.

Peran partisipasi pikiran dalam realisasi proses pembangunan di suatu wilayah tidak secara inheren memerlukan keterlibatan fisik atau keterlibatan langsung. Pengungkapan ide dan umpan balik yang konstruktif, termasuk perspektif kritis dan rekomendasi dari anggota masyarakat, sangat berharga. Partisipasi pikiran melampaui pengertian tradisional tentang kontribusi nyata berupa fisik seperti tenaga, namun juga mencakup gagasan atau konsep yang mendalam yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan penting bagi mekanisme rencana pemerintahan desa. Ketika pengambilan keputusan ditetapkan berdasarkan pertimbangan rasional dan kesesuaian kontekstual, kontribusi pikiran ini dapat menjadi arahan yang sangat berharga bagi tindakan masyarakat.

Pada titik ini, sangat penting bagi masyarakat untuk berkembang lebih dari sekadar mengartikulasikan pemikiran dan

perspektif melainkan masyarakat harus berusaha untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pemahaman, dan artikulasi berbagai tantangan yang muncul di wilayah Desa (*Kalurahan*) Patuk. Perkembangan dalam keterlibatan masyarakat ini akan memberdayakan mereka untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan program kegiatan yang membutuhkan perhatian segera dan harus dilaksanakan sesuai dengan isu-isu yang ada. Partisipasi yang proaktif dan terinformasi seperti ini sangat penting dalam upaya untuk mencapai hasil pembangunan yang tidak hanya berhasil tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang, sehingga memastikan kesejahteraan dan pertumbuhan masyarakat secara keseluruhan.

## **2. Pelaksanaan**

Tahap selanjutnya dari perencanaan pembangunan desa, khususnya mengenai pelaksanaan pembangunan desa, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Pembangunan ini akan membutuhkan peran partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat dengan menumbuhkan semangat kegotongroyongan. Pembangunan desa akan mendayagunakan kearifan lokal (*local wisdom*) dan seluruh sumber daya (*resources*) milik desa. Selain itu, dengan adanya informasi yang disampaikan secara terbuka warga desa juga berhak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu,

pemerintah desa bertanggung jawab guna mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat mengenai rancangan dan implementasi RKP Desa.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat penting untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan desa, karena ketiadaan keterlibatan masyarakat dapat menimbulkan tantangan yang signifikan.

wilayah Desa (*Kalurahan*) Patuk selama tahap pelaksanaan pembangunan masyarakat didorong untuk ikut serta menandakan bahwa keterlibatan mereka dalam pembangunan desa tetap kuat. Masyarakat berkontribusi dalam berbagai cara termasuk tenaga, ide, dan barang, menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Seperti yang dikemukakan oleh Keith Davis dalam (Sastropetro, 1998), partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam setiap inisiatif pembangunan, karena dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan program-program yang dilaksanakan.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dapat berupa berbagai macam wujud, antara lain:

a. Partisipasi tenaga (*physical participation*)

**Gambar 3 Pelaksanaan Partisipasi Tenaga**



*Sumber: Pemerintah (Kalurahan) Desa Patuk*

Hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat desa dan Sumadi Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (*Kalurahan*) Desa Patuk

*Kami sebagai warga pasti sering terlibat dalam kegiatan gotong royong, seperti memperbaiki saluran air, talud, atau jalan. Menurut saya, gotong royong sangat penting karena sebagai manusia kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. warga selalu berusaha menyempatkan waktu untuk ikut serta, meskipun terkadang ada kesibukan. Kebanyakan warga di sini bekerja sebagai petani, peternak, atau wiraswasta, jadi kegiatan gotong royong bisa berjalan lancar jika waktunya pas dan warga sedang*

*berada di tempat."* (Masyarakat  
(*Kalurahan*) Desa Patuk)

*".....ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat salah satu itu tenaga nah masyarakat cukup andil berperan dalam gotong royong membangun jalan desa...."* (Sumadi, Kasasi Kesejahteraan Pemerintah  
(*Kalurahan*) Desa Patuk)

Berdasarkan wawancara dengan warga Desa Patuk, terlihat bahwa partisipasi tenaga dalam kegiatan gotong royong suatu hal yang umum dan penting dalam kehidupan mereka. Salah satu warga menyatakan bahwa mereka turut terlibat dalam berbagai aktivitas gotong royong membangun infrastruktur seperti memperbaiki saluran air, talud, dan jalan. Mereka percaya bahwa gotong royong sangat krusial karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. Meskipun terkadang ada kesibukan, warga selalu berusaha untuk meluangkan waktu agar dapat berpartisipasi aktif.

Mayoritas latar pekerjaan penduduk di desa ini bekerja sebagai petani, peternak, atau wiraswasta, sehingga kegiatan gotong royong dapat berjalan dengan baik jika waktu yang tepat dan kehadiran warga memungkinkan.

Sumadi, yang sebagai Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (*Kalurahan*) Desa Patuk, menerangkan bahwa ada berbagai bentuk partisipasi masyarakat salah satunya ialah kontribusi tenaga. Ia menekankan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam gotong royong terutama dalam pembangunan jalan desa.

Pernyataan ini menekankan bahwa semangat gotong royong di Desa Patuk tidak hanya sekadar bagian tradisi tetapi juga mencerminkan rasa solidaritas dan tanggung jawab sosial yang mendalam di antara para warganya. Hal ini berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu manifestasi nyata dari semangat ini ialah partisipasi tenaga, betapa penting kontribusi masyarakat memberikan partisipasi dalam bentuk tenaga fisik untuk mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan. Di Desa Patuk, partisipasi tenaga menjadi bentuk kontribusi yang paling esensial dengan setiap individu berperan aktif.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, partisipasi tenaga dilakukan secara gotong royong tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kesadaran dan keikhlasan masyarakat menjadi landasan utama yang mendorong mereka untuk berkontribusi. Dengan pendekatan ini, masyarakat Desa Patuk tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan semangat kebersamaan yang menjadi karakteristik desa mereka.

Keterlibatan tenaga kerja dapat ditingkatkan saat membangun infrastruktur jalan di Desa (*Kalurahan*) Patuk, upaya gotong royong masyarakat tidak hanya membantu mempercepat proses pembangunan, tetapi juga memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan Keith Davis (Sastropetro, 1998) yang menyatakan bahwa partisipasi tenaga kerja merupakan komponen penting dalam pembangunan wilayah desa karena manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,

terutama yang berada di wilayah yang tengah mengalami perkembangan pembangunan. Secara keseluruhan, keterlibatan tenaga pada warga Desa (*Kalurahan*) Patuk menunjukkan adanya dedikasi dan kesadaran kolektif untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

b. Partisipasi barang (*material participation*)

Berdasarkan temuan penelitian terkait partisipasi material di desa, pemerintah desa menargetkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan material perkerasan jalan, seperti pasir, semen, dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan fisik. Peneliti mengungkapkan bahwa peran masyarakat dalam menyediakan barang sejalan dengan teori Keith Davis dalam (Sastropetro, 1998) yang menekankan pada antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Sebagai gambaran, masyarakat terlibat aktif dalam peminjaman alat pengerjaan manual dan mesin pengaduk beton yang berkualitas. Disamping itu, keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan peralatan, bahan konstruksi hingga konsumsi sangat penting untuk mendukung upaya pembangunan infrastruktur. Temuan ini sejalan dengan teori Keith Davis dalam (Sastropetro, 1998) yang menyatakan bahwa masyarakat termasuk masyarakat di Desa telah berpartisipasi dengan meminjamkan peralatan konstruksi dan menyumbangkan bahan bangunan seperti pasir, semen, dan batu. Dukungan

ini sangat penting untuk memperlancar dan meningkatkan efektifitas kegiatan pembangunan infrastruktur sehingga menekankan pentingnya kontribusi masyarakat dalam keberhasilan pelaksanaan program pembangunan jalan desa.

c. Partisipasi uang (*money participation*)

Pada hakikatnya, pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui upaya kolaboratif antara entitas pemerintah dan masyarakat desa dengan tujuan utama untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Guna memfasilitasi proses pembangunan infrastruktur yang menjamin pelaksanaan inisiatif pembangunan tanpa hambatan, sangat penting untuk memiliki partisipasi masyarakat yang kuat terutama selama tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Salah satu wujud nyata dari partisipasi tersebut dapat dilihat dalam bentuk kontribusi nyata, khususnya dukungan pendanaan, yang ditujukan untuk mendukung realisasi berbagai program pembangunan infrastruktur secara efektif.

Keterlibatan masyarakat melalui partisipasi material memainkan peran penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan. Biasanya, keterlibatan material ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan uang atau sumber daya berupa harta benda yang dialokasikan untuk memastikan perkembangan inisiatif pembangunan yang efisien dengan tujuan akhir untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, sebagai

otoritas utama yang dipercayakan untuk mengawasi dan mengelola kontribusi material tersebut, untuk menjunjung tinggi standar kepercayaan dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Yang penting, partisipasi material tidak harus selalu ditandai dengan jumlah yang besar atau bentuk yang mewah, namun dapat mencakup sumbangan keuangan atau sumber daya yang sederhana yang secara signifikan berkontribusi pada keberlanjutan dan keberlangsungan upaya pembangunan. Bahkan kontribusi materi yang paling kecil sekalipun yang diberikan oleh anggota masyarakat harus diakui, dikelola secara efektif, dan dihargai atas potensi dampaknya.

Bentuk partisipasi ini dengan memanfaatkan sumber daya keuangan sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan pembangunan, sering terlihat di antara para individu yang berasal dari lapisan ekonomi yang berbeda juga di antara para anggota dewan dan melalui sumber-sumber pendanaan pemerintah. Kontribusi uang yang terwujud dengan cara ini memiliki dampak yang substansial dan terukur terhadap keberhasilan berbagai program pembangunan, sebuah fakta yang dikuatkan oleh wawasan yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan Sumadi Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (*Kalurahan*).

Hasil wawancara peneliti dengan Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Sumadi Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (*Kalurahan*) Desa Patuk, Wagirin Pamong Dukuh Ngandong dan Riyanta ketua RT 07 mengatakan:

*“...Partisipasi uang ada beberapa mas diantaranya itu swadaya juga ada anggota atau dewan partai NASDEM menyumbangkan dana dan anggaran dana desa lainnya menopong pelaksanaan pembangunan jalan, mengenai masyarakat pasti sepndapat....”* (Riyanta ketua RT 07)

*“ya masyarakat pasti setuju, adanya alokasi dana bantuan dari dari pemerintah desa dan juga ada swadaya”* (Wagirin Pamong Dukuh Ngandong)

*“.....sesuai yang dipaparkan sebelumnya partisipasi ini sudah mencakupi dana desa dan dana lainnya juga berasal dari partai politik dan KB TNI itu tadi di sampaikan....”* (Sumadi, Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (*Kalurahan*) Desa Patuk)

Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang, khususnya pendanaan pembangunan jalan merupakan faktor kunci keberhasilan. Berdasarkan wawancara dengan Riyanta (Ketua RT 07), Wagirin (Pamong Dukuh Ngandong), dan Sumadi (Kasasi Kesejahteraan Pemerintah Desa Patuk), teridentifikasi beberapa sumber dana yang mendukung pembangunan ini. Sumber dana tersebut

meliputi swadaya masyarakat, TNI, sumbangan anggota/dewan partai, dan alokasi dana pemerintah desa.

Partisipasi masyarakat melibatkan berbagai bentuk kontribusi, termasuk dana desa dan sumber pendanaan lainnya. Dukungan dan kesepakatan kolektif dari masyarakat terhadap upaya pembangunan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan warga. Sinergi antara kedua pihak ini merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan optimal, sehingga anggaran pemerintah desa dapat lebih difokuskan pada pelaksanaan pembangunan jalan, sementara realisasi anggaran di bidang lainnya mungkin tidak maksimal. Berikut adalah data tabel realisasi anggaran APBDes/APBKal 2023 yang telah terealisasi:

**Tabel 4. 3****Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023**

No	Kategori	Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Desa</b>	<b>2.046.088.679,00</b>
	a. Pendapatan Asli Desa	191.483.448,00
	b. Pendapatan Transfer	1.840.287.000,00
	c. Pendapatan Lain-lain	14.318.231,00
<b>2</b>	<b>Belanja Desa</b>	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	938.779.531,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	682.783.450,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	59.775.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	248.006.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	100.800.000,00
	Jumlah Belanja	<b>2.030.143.981,00</b>
	Surplus/Defisit	15.944.698,00
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Desa</b>	
	a. Penerimaan Pembiayaan	242.594.244,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a - b)	142.594.244,00
	SILPA Tahun Berjalan	<b>158.538.942,00</b>

*Sumber: PERKAL NO 1 TAHUN 2024 TENTANG LPJ  
REALISASI APBKAL TA 2023*

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Patuk tahun 2023 menunjukkan bahwa distribusi anggaran difokuskan pada beberapa inisiatif pembangunan yang sangat penting bagi kemajuan desa. Alokasi dana ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan, serta program pelatihan bagi perangkat desa untuk memperkuat kapasitas manajerial. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur, seperti Jalan, talud dan lainnya mendukung peningkatan infrastruktur vital masyarakat. Pembinaan kemasyarakatan menjadi prioritas dengan program pemberdayaan yang

mendorong partisipasi warga dalam pembangunan, serta kegiatan sosial yang memperkuat kohesi antarwarga. Terakhir, anggaran juga disiapkan untuk penanggulangan bencana dan keadaan darurat, termasuk penyediaan dana darurat dan pelatihan kesiapsiagaan bagi masyarakat. Dengan demikian, distribusi anggaran yang terencana ini diharapkan dapat mendorong kemajuan signifikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pedesaan.

Laporan ini menyoroti pentingnya kerja sama masyarakat dalam mewujudkan pembangunan fisik yang berkelanjutan di Desa Patuk. Laporan tersebut menekankan bahwa Keberhasilan pembangunan desa bergantung pada partisipasi masyarakat yang kuat menurut (Jamaludin, 2015) bahwa Partisipasi ini harus melampaui pengamatan pasif, Hal ini senada dengan tujuan pembangunan di Desa (*Kalurahan*) Patuk untuk mencakup peran aktif dalam perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi berbagi manfaat program pembangunan dengan dukungan peran serta penuh dan menyeluruh dari berbagai pihak elemen terlibat pada partisipasi.

Gotong royong menjadi pilar utama dalam pembangunan Desa (*Kalurahan*) Patuk, masyarakat berkontribusi secara aktif dengan untuk percepatan pembangunan dan penguatan rasa kebersamaan. Dengan adanya alokasi anggaran pendapatan desa mencapai 2.046.088.679,00 dan pembangunan fisik jalan desa

terrealisasikan 40% dengan menggunakan biaya 682.783.450,00 pada anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa menunjukkan prioritas utama terhadap infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, anggaran sebesar 248.006.000,00 untuk pemberdayaan masyarakat desa, 100.800.000,00 Pembinaan Kemasyarakatan dan 100.800.000,00 Penanggulangan Bencana dan menyisahkan surplus anggaran sebesar 15.944.698,00 ini menunjukkan komitmen desa dalam meningkatkan infrastruktur fisik hingga kapasitas masyarakat melalui pengembangan lokal.

Keberhasilan program-program pembangunan di Desa (*Kalurahan*) Patuk tak lepas dari sinergi antara pemerintah desa dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Pembangunan yang dilakukan bukan hanya sekedar meningkatkan kualitas infrastruktur fisik, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu berkontribusi lebih besar pada pembangunan jangka panjang. Partisipasi yang sinergis dan aktif menjadi kunci utama dalam menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

### **3. Evaluasi**

Evaluasi di Desa Patuk dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan Prakarsa Pembangunan Desa yang membutuhkan penyempurnaan dan peningkatan secara signifikan. Fase evaluasi yang kritis ini terintegrasi secara mulus ke dalam proses musyawarah

desa. Penilaian yang rutin dan menyeluruh terhadap berbagai proyek pembangunan dilakukan sepanjang siklus hidupnya, memastikan perbaikan berkelanjutan. Penting untuk dicatat bahwa evaluasi ini melampaui sekadar penyelesaian proyek; ia secara aktif melibatkan kegiatan pelestarian, pemeliharaan, dan pemantauan untuk dampak yang berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya mendorong keterlibatan masyarakat tetapi juga menjamin bahwa infrastruktur yang sedang berjalan, terutama terutama dalam hal pemeliharaan dan mempertahankan infrastruktur jalan supaya sesuai standar kualitas yang tinggi.

Selain itu, penting untuk digarisbawahi bahwa evaluasi juga dilakukan secara strategis melalui beragam aktivitas yang memfokuskan pada pelestarian, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap berbagai proyek desa. Upaya komunal ini tidak hanya mendorong keterlibatan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa prakarsa pembangunan yang telah dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis dapat dipelihara dan dijaga agar tidak mengalami penurunan kualitas, terutama dalam hal pemeliharaan infrastruktur jalan desa.

Temuan komprehensif dengan jelas menunjukkan bahwa hasil pembangunan yang sukses secara fundamental berakar pada sinergi kolaboratif dari semua pemangku kepentingan dan berbagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengakui bahwa pemerintahan Desa, bersama warga desa, berfungsi sebagai titik acuan penting dan tolok ukur penting untuk menilai dan

menentukan keberhasilan dan efektivitas inisiatif evaluasi perkembangan pembangunan infrastruktur desa secara keseluruhan.

Opname pembangunan fisik yaitu proses pemeriksaan dan pencatatan kondisi fisik proyek pembangunan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan standar. Ini melibatkan pemeriksaan sistematis terhadap kondisi fisik suatu proyek selama siklusnya.

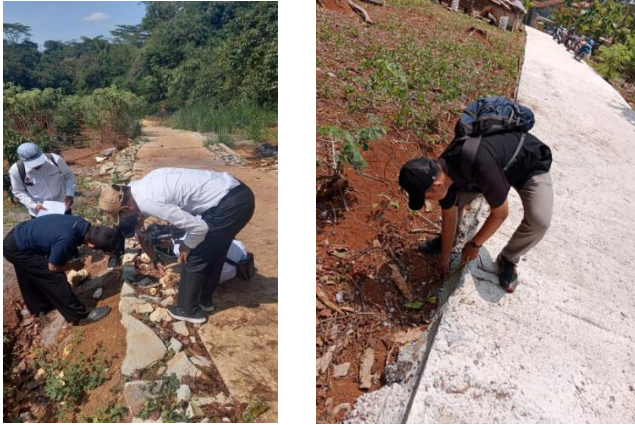
Aspek-aspek penting dari proses ini meliputi:

1. Verifikasi Kualitas: Memastikan material dan teknik yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah ditetapkan.
2. Pengukuran Kuantitas: Mengukur secara akurat volume, luas, atau ukuran pekerjaan yang sudah selesai untuk memastikan keselarasan dengan kontrak dan alokasi anggaran.
3. Menyelidiki Kemajuan: Menilai kemajuan proyek terhadap jadwal yang telah ditentukan untuk menjaga agar tetap berjalan sesuai rencana.
4. Dokumentasi: Merekam temuan inspeksi secara rinci dan menghasilkan laporan yang menggambarkan kondisi fisik proyek, termasuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperbaiki.
5. Rekomendasi Perbaikan: Memberikan rekomendasi tindakan untuk perbaikan atau penyesuaian ketika terdapat perbedaan antara pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan rencana atau spesifikasi.

Pemantauan dan evaluasi penilaian merupakan komponen penting dalam proyek konstruksi di Desa Patuk, yaitu pengamatan langsung di lokasi untuk menjamin kepatuhan terhadap kriteria yang telah disepakati seperti lebar jalan, panjang jalan yang dibangun dan kelayakan material yang digunakan selama siklus proyek. Dengan mengikuti standar konstruksi rabat beton, diyakini bahwa jalan yang dibangun akan tahan lama, kokoh, dan tahan terhadap dampak kerusakan yang disebabkan penggunaan jalan yang dilalui oleh kendaraan.

Evaluasi berfungsi sebagai bentuk penilaian terhadap masyarakat desa dengan tujuan memberikan umpan balik kepada pemerintah desa agar kinerja dan pelaksanaan program selanjutnya dapat ditingkatkan. Di bawah ini merupakan gambaran kegiatan evaluasi pembangunan di Desa (*Kalurahan*) Patuk dalam menilai perkembangan pembangunan di desa ini:

**Gambar 4 Proses Eevaluasi dan opname Fisik Cor Rabat Jalan  
Desa**



*Sumber: Pemerintah (Kalurahan) Desa Patuk*

## **BAB V**

### **FAKTOR MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA PATUK**

Bab ini akan memeriksa secara rinci elemen-elemen faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur jalan di Desa (*Kalurahan*) Patuk pada tahun 2023. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang telah dilaksanakan akan dijelaskan secara rinci kontribusi dari berbagai variabel baik yang bersifat pendorong maupun penghambat terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

#### **A. Faktor Pendorong**

Pembangunan suatu proses kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan pembangunan wilayah pedesaan. Dalam konteks Desa (*Kalurahan*) Patuk, partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Namun, tingkat keterlibatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya:

##### **1. Harapan dan Aspirasi Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan selama pertemuan perencanaan pembangunan secara signifikan dibentuk oleh harapan dan aspirasi anggotanya. Harapan dan keinginan ini berasal dari dalam diri masyarakat dan mencerminkan perubahan yang mereka inginkan untuk masa depan yang lebih baik. Masyarakat mengantisipasi perbaikan di lingkungan mereka, yang secara alami mendorong mereka untuk terlibat dan menyumbangkan

pemikiran selama diskusi perencanaan pembangunan. Berdasarkan temuan peneliti terdapat peningkatan yang nyata dalam partisipasi masyarakat ketika individu memiliki harapan yang kuat terhadap pencapaian spesifik. Pemenuhan Kebutuhan dan Aspirasi Masyarakat.

Adanya inisiatif keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan keputusan selama musrenbang secara signifikan dibentuk oleh dukungan masyarakat itu sendiri. Berbagai keinginan dan tuntutan datang dari warga mencerminkan perubahan demi mewujudkan perbaikan di lingkungannya. Masyarakat mengantisipasi pendangkalan peningkatan di wilayah mereka sehingga secara alamiah mendorong mereka terlibat dan menyumbangkan ide dalam diskusi perencanaan pembangunan pada forum musrenbangkal di. Menurut temuan penelitian, terdapat peningkatan yang nyata dalam keterlibatan masyarakat ketika individu memiliki motivasi yang kuat untuk memperoleh capaian hasil secara spesifik. Berdasarkan wawancara Riyanta ketua RT 07 mengatakan

*“...kalau kita lihat IPM disini lebih maju insiatif dan kemauan partisipasi berdampak pada pembangunan yang akan di rencanakan pemerintah masyarakat pasti sepatutnya dengan saya...” (Riyanta ketua RT 07)*

*“....saya setuju pernyataan pak riyanta tanpa adanya kemauan mandiri warga tidak akan ada pembangunan mestinya dana juga*

*dari bantuan-bantuan pihak lain.....” (masyarakat)*

Hasil wawancara dengan Riyanta, Ketua RT 07, dan masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam pembangunan. Riyanta menyatakan bahwa kemajuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di dukuh Patuk khususnya RT 07 sangat dipengaruhi oleh inisiatif dan keinginan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan.

Lebih lanjut, anggota masyarakat menegaskan bahwa partisipasi aktif dari warga dan dukungan dari sumber eksternal diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Hal ini menekankan nilai kemitraan strategis antara pemerintah dan masyarakat dalam menggalakkan pembangunan berkesinambungan.

Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tidak hanya mencerminkan keinginan mereka untuk berkontribusi, tetapi juga menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat peran dan keterlibatan masyarakat serta meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat desa.

Keterlibatan dalam inisiatif warga desa merupakan elemen penting dalam proses pembangunan di daerah pedesaan. Partisipasi tersebut memungkinkan setiap orang untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan lokal. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses ini, maka akan meningkatkan efektivitas upaya pembangunan, karena mereka dapat memberikan wawasan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah tersebut.

Selain itu, inisiatif yang mendorong partisipasi masyarakat akan mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam tindakan pemerintah, sekaligus menekankan potensi Perselisihan dan ketimpangan terkait hasil pengembangan tersebut.

## **2. Kondisi Sosial Masyarakat**

Situasi sosial Desa Patuk diwarnai oleh berbagai aspek kehidupan sosial budaya masyarakat, mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dengan jumlah penduduk mencapai presentase 99% dari seluruh penduduknya. Kehidupan beragama menjadi landasan dalam interaksi sosial, sehingga memungkinkan penerapan norma-norma agama dan penanaman sikap toleransi secara efektif. Masyarakat terus menjunjung tinggi nilai-nilai dan kebiasaan yang diwarisi dari nenek moyang mereka mengintegrasikannya dengan praktik-praktik kontemporer. Tradisi gotong royong tetap hidup dalam interaksi sosial di Desa Patuk, yang mencerminkan adat budaya yang telah dilestarikan dari generasi ke generasi. Kultur dan kearifan lokal menjadi pertimbangan penting dalam setiap upaya pembangunan, karena dianggap sebagai alat yang memfasilitasi berjalannya proses pembangunan. Berbagai wawancara dengan para informan mengungkapkan bahwa pemerintah desa dan masyarakat berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan kearifan lokal, khususnya prinsip gotong royong. Pendekatan ini memastikan bahwa aspek budaya dan nilai-nilai lokal tidak terabaikan dalam proses pembangunan, baik dalam proyek infrastruktur maupun inisiatif pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan (Koentjaraningrat, 2009) bahwa nilai-nilai

kearifan lokal dapat secara signifikan mendukung pembangunan. Meskipun diakui bahwa tidak semua nilai kearifan lokal bermanfaat bagi pembangunan, temuan ini menunjukkan bahwa di Patuk, semangat energi lokal berfungsi sebagai kekuatan positif yang meningkatkan dan mendukung proses pembangunan.

### **3. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Setelah menetapkan bahwa kondisi sosial masyarakat mempunyai dampak yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penting untuk mempertimbangkan peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam konteks ini, khususnya mengingat beragamnya latar belakang pekerjaan masyarakat di Desa (*Kalurahan*) Patuk, termasuk mereka yang bekerja di Desa Patuk. sektor swasta dan pertanian. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Desa (*Kalurahan*) Patuk dipengaruhi oleh pendapatannya. Variasi keterlibatan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan, kesibukan, dan waktu kerja. Menurut penelitian, orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap cenderung tidak berpartisipasi dalam implementasi pembangunan. Ketergantungan pada pendapatan pertanian mungkin membatasi keterlibatan mereka, namun individu tetap berkontribusi sepanjang tahap perencanaan pembangunan, baik mereka mempunyai pekerjaan tetap atau tidak.

Kualitas sumber daya manusia suatu daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhannya, yang merupakan komponen penting dalam proses pembangunan. Keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia mempunyai dampak yang signifikan terhadap kecepatan dan kualitas pembangunan. Desa

(*Kalurahan*) Patuk memiliki potensi sumber daya manusia yang tinggi, yang didukung oleh sejarah panjang gotong royong di antara anggota masyarakat, terlepas dari tingkat sosial ekonomi atau pekerjaan. Praktik ini telah menjadi faktor pendorong utama dalam proses pembangunan, yang memungkinkan masyarakat untuk menciptakan infrastruktur seperti jalan dan irigasi sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka. Keterlibatan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar dan pendukung akan meningkatkan proses pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, kemitraan masyarakat-pemerintah dan pengelolaan sumber daya yang baik sangat penting untuk memastikan pembangunan jangka panjang dan adil.

## **B. Faktor Penghambat**

Telah diakui secara luas bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau masyarakat, melainkan merupakan upaya kolaboratif yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua segmen masyarakat. Keberhasilan pembangunan di Desa (*Kalurahan*) Patuk mencerminkan keberhasilan pembangunan nasional secara lebih luas, itulah sebabnya prioritas pembangunan nasional berfokus pada pembangunan desa. Ketika pembangunan terjadi di daerah pedesaan, keterlibatan masyarakat desa menjadi sangat penting untuk keberhasilannya. Besarnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dibentuk oleh banyak unsur. Berdasarkan pengamatan peneliti, berbagai faktor tersebut secara signifikan

mempengaruhi tingkat keterlibatan warga dalam inisiatif pembangunan di Desa (*Kalurahan*). Patuk

### **1. Pengambilan Keputusan**

Berbagai elemen mempengaruhi pelaksanaan pengembangan infrastruktur jalan di dalam desa. Faktor signifikan adalah keterlibatan perspektif masyarakat. Seperti yang dibahas sebelumnya mengenai partisipasi, berbagai hambatan mempengaruhi proses pelaksanaan, salah satunya berkaitan dengan prosedur pengambilan keputusan. Ini termasuk proposal yang diajukan oleh hadirin turut serta menyampaikan pendapat pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Seringkali, perwakilan masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasi mereka dengan efektif, atau terjebak dalam proses perencanaan yang tidak mencerminkan prioritas kebutuhan wilayah di Desa (*Kalurahan*) Patuk. Hal ini mengakibatkan pembangunan yang dilakukan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa. Selain itu, dalam proses identifikasi dan perumusan masalah pada Musrembang tidak semua masukan atau pendapat masyarakat yang seharusnya di terima bersama kesepakatan di forum Musrembang akibat pengambilan keputusan tertentu dari berbagai pihak stakeholders desa berlebihan. Situasi ini membuat menghambat persiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah mereka.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Sumadi Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (*Kalurahan*) Desa Patuk, Wagirin Pamong Dukuh Ngandong dan Riyanta ketua RT 07

*“...Ini faktor utamanya itu pada pengambilan keputusan mereka memberikan masukan - masukan tidak di perlukan ada yang harus belok sana-sini itu malahan ada yang masuk jalur pribadi bukan jalur dukuh-dukuh bisa di akses. Itulah kami perlu mengkaji dan meninjau berapa jarak tepat di lokasi mas...”* Sumadi, Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (*Kalurahan*) Desa Patuk)

*“faktor-faktor kendala tidak ada di lapangan mungkin bisa anda tanyakan pada pihak penyelenggara musrenbang ”* (Wagirin Pamong Dukuh Ngandong)

Proses pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur di Desa (*Kalurahan*) Patuk menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan komunikasi efektif. Menurut Sumadi, Kasasi Kesejahteraan Pemerintah (*Kalurahan*) Desa Patuk, masukan masyarakat merupakan faktor utama dalam pengambilan keputusan. Namun, masukan yang tidak relevan atau bersifat pribadi dapat mengganggu proses ini. Oleh karena itu, kajian dan peninjauan cermat mengenai lokasi dan jarak pembangunan sangat penting. Wagirin, Pamong Dukuh Ngandong, menambahkan bahwa proses

pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik, meskipun ada tantangan. Hal ini menekankan pentingnya transparansi dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan dalam hasil wawancara ini mencerminkan pentingnya komunikasi yang efektif dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta perlunya evaluasi yang mendalam untuk memastikan bahwa masukan yang diterima relevan dan konstruktif bagi pembangunan yang berkelanjutan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Infrastruktur desa komponen vital dalam memainkan peran fundamental dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya. Di Desa Patuk, pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Jalan desa, sebagai salah satu infrastruktur utama, direncanakan dan direalisasikan untuk memfasilitasi konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas warga, serta mendukung kegiatan ekonomi lokal. Jalan yang memadai juga memberikan akses yang lebih baik ke fasilitas publik, pasar hingga akses aktivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. Selain itu, pengembangan sarana dasar lainnya seperti turut mendukung kebutuhan masyarakat, terutama dalam menunjang produktivitas sektor pertanian yang menjadi basis ekonomi lokal. Proses perencanaan pembangunan ini dilaksanakan secara terarah melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal), yang dirumuskan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Forum ini melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga aspirasi lokal dapat diakomodasi ke dalam rencana pembangunan yang komprehensif dan tepat sasaran.

Pembangunan infrastruktur di Desa Patuk juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui partisipasi aktif masyarakat turut berkontribusi dalam berbagai tahap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Khususnya, semangat gotong royong keterlibatan masyarakat menjadi dalam bentuk sumbangan tenaga, uang maupun barang dan pada proses pelaksanaan dan pada proses evaluasi bentuk opname fisik meliputi Verifikasi Kualitas, Pengukuran Kuantitas, Menyelidiki, Dokumentasi, Rekomendasi Perbaikan demi mendukung realisasi program Pembangunan jalan desa. Melalui kegiatan ini, tidak hanya infrastruktur fisik yang terbangun tetapi juga tercipta hubungan sosial yang lebih erat antarwarga. Pendekatan ini tidak hanya menguatkan ikatan sosial di antara warga tetapi juga meningkatkan rasa kepedulian terhadap hasil pembangunan. Infrastruktur yang terbangun secara partisipatif ini menjadi tulang punggung keberlanjutan pembangunan desa.

keberhasilan pembangunan infrastruktur di Desa Patuk dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah pertama, Sumber Daya Manusia, Kualitas kualitas sumber daya manusia di Desa Patuk bersama dengan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah memainkan peran krusial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong pembangunan menjadi faktor kunci dalam memastikan pembangunan berkelanjutan dan adil di Desa Patuk. Kedua, Kesadaran harapan dan aspirasi masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pembangunan ini sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi antara pemerintah desa dan warga

yang terjalin dengan baik akan menciptakan sinergi yang positif dalam pembangunan turut menjadi penentu pola komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan dalam setiap tahapan pembangunan. Ketiga kondisi sosial yang harmonis di Desa Patuk memiliki memadukan nilai agama, tradisi gotong royong, dan kearifan lokal sebagai pondasi utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Patuk mencakup proses pengambilan keputusan yang tidak efektif, masukan aspirasi masyarakat sering kali tidak terwakili dengan baik sehingga mengakibatkan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil pedesaan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat berbagai tantangan dan hambatan dapat diatasi menjadikan pembangunan infrastruktur di Desa Patuk sebagai salah satu contoh praktik pembangunan partisipatif yang berhasil.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan di Desa Patuk, berikut ini ada sejumlah saran yang dapat diberikan untuk memastikan bahwa temuan ini dapat memberikan lebih banyak manfaat dan dampak positif di kemudian waktu:

- **Peningkatan Kesadaran dan Sosialisasi**

Pemerintah desa perlu memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam setiap tahap pembangunan, terutama dalam perencanaan

dan pengawasan. Upaya ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi, pertemuan komunitas, dan program edukasi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat.

- **Penguatan Mekanisme Partisipasi**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) harus dioptimalkan agar dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan rekomendasi mereka. Selain itu, pemerintah desa dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarluaskan informasi terkait pembangunan, seperti melalui media sosial atau aplikasi berbasis komunitas.

- **Dukungan Kapasitas dan Sumber Daya**

Pemerintah desa perlu menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat tentang cara berpartisipasi secara efektif dalam pembangunan desa. Selain itu, dukungan dalam bentuk logistik, finansial, dan fasilitas juga perlu ditingkatkan untuk mempermudah keterlibatan masyarakat.

- **Kolaborasi yang Lebih Inklusif**

Penting untuk mengupayakan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, dan organisasi lokal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dapat terwujud.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga proses pembangunan desa menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan warga desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'an, Maryani, S., & Eka, A. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.47753/pjap.v3i1.138>
- Ahmad, H., Rajab, A., & Malik, M. M. (2023). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 19(3), 689–701.
- Andriani, Helmin, M. S., Sukmana, Dhika Juliana, S, Si., M. S., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, Jumari, M. S., Utami, Evi Fatmi, M.farm., A., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); 1st ed., Issue March). CV. Pustaka Ilmu.
- Balak, K., Bakarbesy, D., & Wlontoda, R. A. (2021). Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Desa (Studi Deskriptif di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah). *Badati*, 3(2), 20–28.
- Dahliah. (2022). Analisis Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat kedalam APBD Kabupaten Majene. *YUME: Journal of Management*, 5(3), 774–795. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/41>

- Darin, Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS*, 15(1), 11–21. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502>
- Farida, A., Arifuddin, M. H., Rahimi, N., & Kamarni, N. (2022). Pengaruh Pembangunan Desa terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 191–205. <https://doi.org/10.33059/jseb.v13i2.5253>
- Ikkbal, M., & Jabbar, A. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 5(1), 581–588. [https://doi.org/10.25299/wedana.2019.vol5\(1\).3086](https://doi.org/10.25299/wedana.2019.vol5(1).3086)
- Ismatullah, I., & Mahendra, G. K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.556>
- Kumala Dewi, L., Triono, B., & Suluh Kusuma Dewi, D. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam program pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(1), 45–60. <https://doi.org/10.32669/villages.v1i1.12>
- Latif, A., Rusdi, M., & Setiawan, D. (2020). Partisipasi Masyarakat

Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 26–39. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i1.209>

Masruri, M. (2022). Peran Kepemimpinan Kepala Kalurahan Tepus untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Kalurahan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3715–3724. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3445%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/3445/2937>

Mawikere, O., Abdussamad, J., & Mozin, S. Y. (2023). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3806.

Meisy M. P. Bidara, W. F. W. T. L. (2022). STRATEGI PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 92–105. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/42655>

Mono, A., & Samaloisa, R. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), 113–121.

<https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.259>

- Penny, P., Ningrum, R. W. N., Nurwijayanto, Tri Haryadi, D. A., & Prayoga Siska, F. (2023). Implementasi Program Pembangunan di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kota Pontianak. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 3(1), 55–68. <https://doi.org/10.47431/jmd.v3i1.312>
- Rachaju, K., Hikmat, A., & Abdurrahman, M. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa. *Jurnal Soshum Insentif*, 5(2), 168–190. <https://doi.org/10.36787/jsi.v5i2.867>
- Rumegang, G., Kaawoan, J. E., & Sumampouw, I. (2021). Efektivitas Musrembang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud. *Governance*, 1(2), 1–11.
- Sabrina, R. (2022). Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22(1), 53–61. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i1.10200>
- Safaruddin, Muliati, & Lubis, I. A. (2023). LEVELS OF COMMUNITY PARTICIPATION IN THE VILLAGE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROGRAM IN BINUANG VILLAGE, BALUSU DISTRICT, BARRU DISTRICT. *Meraja Journal*, 5(3), 430–449.
- Setiawan, F. (2023). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Tumbang Bantian. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan*

*Administrasi Negara*, 7(1), 48–58.  
<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4157>

Sudianing, N. K. (2020). Fungsi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Peningkatan Kinerja Kebijakan Publik Di Bidang Pembangunan Daerah. *Locus*, 12(1), 120–131.  
<https://doi.org/10.37637/locus.v12i1.292>

Syed Agung Afandi, Muslim Afandi, & Erdayani, R. (2022). Pengantar Teori pembangunan. In N. H. Afandi (Ed.), *Ebook* (1st ed.). <https://doi.org/10.31219/osf.io/qf5hr>

Tapi, T., Rumata, N. A., Soetijono, I. K., Hippy, M. Z., R, S. A., Pratama, A. P. P. A., Anwarudin, O., Pardosi, K. M. M. H. F., Mursalim, Sugiarto, A. P. D. M., & Putra, H. S. (2024). Pembangunan Desa. In A. Karim (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (1st ed.). Yayasan Kita Menulis.

Yunita, S., & Idrus, M. (2023). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa ( Studi di Desa Lamonggi Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana ) Factors Influencing Community Participation in Village Development ( A Study in Lamonggi Village Kabaena Te. 16(1), 62–67.*

Zalfa, F., Rifan, H., Ashshiddiqie, I., Oktaviani, R., Widiastuti, T. T., & Pd, M. (2024). *DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP KONDISI SOSIAL MASYARAKAT DI DESA SITUWANGI, KECAMATAN CIHAMPELAS, KABUPATEN BANDUNG BARAT, JAWA*

*BARAT. 4(8).*

Zulfila. (2023). ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANGDES (Studi Kasus Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis). *Urmal Ilmiah Hospitality 817, 12(2).*

## **BUKU**

Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan pedesaan dan Perkotaan.*  
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Almanshur, M. D. (2017). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF.* Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Damsar, P. D., & indryani, D. (2016). *Pengantar Sosiologi Perdesaan.* Jaarta: KENCANA.

Dr. Harbani Paslong, M. (2020). *METODE PENELITIAN ADMINISTRASI.* Bandung: ALFABETA.

Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Perdesaan.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Keith Davis, J. W. (2000). *Perilaku Dalam Organisasi : Edisi Ketujuh.* Jaarta: Erlangga.

Muslim, A. (2009). *Metodologi Pengembangan Masyarakat.*  
Yogyakarta : Teras Kompleks POLRI.

Riyadi, d. B. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sastropoetro, S. R. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional.* Bandung: Alumni Bandung.

Sirajuddin Saleh, S. M. (2017). *ANALISIS DATA KUALITATIF*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

Soekanto, P. D. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono, P. D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D – MPKK*. Bandung: Alfabeta.

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 354

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI WAWANCARA



## COR RABAT JALAN PATUK RT 07



## COR RABAT JALAN GLUNTUNG RT 16



## COR RABAT USAHA TANI



## KANTOR (KALURAHAN) DESA PATUK




# MUSRENBANG



# RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN

REPERSENTASI KEMENTERIAN, PANGKAL  
PERUBAHAN PERENCANA ANGGARAN BAWA  
TAHUN ANGGARAN 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.3.6	01. Bantuan material	D05	1 LA	22.412.240,00	22.412.240,00	1 LA	22.412.240,00	22.412.240,00	0,00
	02. Organisasi, LPSPK			68.803.000,00	68.803.000,00		68.803.000,00	68.803.000,00	0,00
	Bantuan Modal Jalur Perantara Jalan			68.870.000,00	68.870.000,00		68.870.000,00	68.870.000,00	0,00
5.3.5.02	Bantuan Modal Jalan - Ujan Tengah Kota	D05	128 Hak	1.411.000,00	1.411.000,00	128 Hak	1.411.000,00	1.411.000,00	0,00
	01. Peralatan	D05	16 Hak	75.000,00	75.000,00	16 Hak	75.000,00	75.000,00	0,00
	02. Tangkang	D05	66 Hak	86.000,00	86.000,00	66 Hak	86.000,00	86.000,00	0,00
	03. Mandor	D05	6 Hak	110.000,00	110.000,00	6 Hak	110.000,00	110.000,00	0,00
5.3.5.03	Bantuan Modal Jalan - Bahan Baku Material	D05	1 LA	55.458.000,00	55.458.000,00	1 LA	55.458.000,00	55.458.000,00	0,00
	01. Bantuan Material	D05		55.458.000,00	55.458.000,00		55.458.000,00	55.458.000,00	0,00
5.3.5.04	Bantuan Modal Jalan - Sewa Peralatan	D05	8 Hari	2.000.000,00	2.000.000,00	8 Hari	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	01. Sewa mesin			2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	04. Organisasi Pendidikan, Pelatihan, dan Bimbingan Masyarakat			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.3.5	Bantuan Modal Jalur Perantara Jalan			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.3.5.01	Bantuan Modal Jalan - Bahan Baku Material	PRK	0 LA	0,00	0,00	1 LA	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
	01. Bantuan Material			0,00	0,00		19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
5.3.5.04	Bantuan Modal Jalan - Sewa Peralatan	PRK	0 LA	0,00	0,00	1 LA	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	01. Sewa Mesin			0,00	0,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
5.3.5	Bantuan Modal Jalur Perantara Jalan			0,00	0,00		24.960.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00
5.3.5.03	Bantuan Modal Jalan - Bahan Baku Material	PRK	0 LA	0,00	0,00	1 LA	24.960.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00
	01. Bantuan Material			0,00	0,00		24.960.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00
JUMLAH (Rp)				194.403.960,00	194.403.960,00		194.403.960,00	194.403.960,00	44.840.000,00



KABUPATEN KUTAI TIMUR  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Tidak Diverifikasi  
CMM  
Zaidi purnawan

PATIK, 28 September 2023  
Pembacaan Kegiatan Anggaran,  
SUKAMAH

Halaman 18

# PERATURAN KALURAHAN TENTANG LPJ REALISASI APBKAL TA 2023



LURAH PATUK  
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PATUK  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PATUK,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK/2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
  10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Desa Patuk Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2025 ( Lembaran Desa Patuk Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Patuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 ( lembaran Kalurahan Patuk Tahun 2023 Nomor 5 );
20. Peraturan Kalurahan Patuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Patuk Tahun 2023 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATUK**

dan

**LURAH PATUK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

<b>1. Pendapatan Desa</b>	<b>Rp 2.046.088.679,00</b>
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 191.483.448,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 1.840.287.000,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp 14.318.231,00
<b>2. Belanja Desa :</b>	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 938.779.531,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 682.783.450,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 59.775.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 248.006.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 100.800.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 2.030.143.981,00</b>
Surplus/Defisit	Rp 15.944.698,00
<b>3. Pembiayaan Desa :</b>	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 242.594.244,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp 142.594.244,00
<b>SILPA Tahun Berjalan</b>	<b>Rp 158.538.942,00</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri :

- Lampiran I Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Lampiran II Laporan Kekayaan Kalurahan Sampai dengan 31 Desember 2023.
- Lampiran III Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan di umumkan / di sosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Patuk  
pada tanggal 2 Januari 2024



Diundangkan di Patuk  
pada tanggal 2 Januari 2024

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AJAD SULAIMAN".

AJAD SULAIMAN

LEMBARAN KALURAHAN PATUK TAHUN 2024 NOMOR 1



KAPANEWON PATUK  
**PEMERINTAH KALURAHAN PATUK**

*Desa Patuk Gunungkidul*

Jln. Jogjakarta-Wonosari KM. 18 Pos : 55862  
Posel : desapatuk@gmail.com Laman : www.patuk.desa.id

**PERSETUJUAN BERSAMA**

**PEMERINTAH KALURAHAN PATUK  
DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATUK**

**TERHADAP  
PERATURAN KALURAHAN NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**NOMOR ; 1/BPK/2024  
NOMOR ; 1/PEM/2024**

Pada hari ini selasa tanggal dua bulan januarir tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, bertempat di Kantor Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul pada sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan Patuk dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Patuk menyetujui ;

**PERATURAN KALURAHAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN PATUK TAHUN 2023**

Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Patuk dan ditandatangani oleh Lurah Patuk dan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Patuk.

Ketua Bamuskal Patuk



Lurah Patuk



LAPORAN REALISASI APBD  
 PEMERINTAH KABUPATEN PATUK  
 KABUPATEN PATUK  
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
 TAHUN ANGGARAN 2023

	Ref.	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa	C2	235.127.000,00	191.483.498,00	33.643.552
Pendapatan Transfer		1.838.327.600,00	1.840.287.000,00	1.959.400
Dana Desa	C3	1.005.477.000,00	1.005.477.000,00	-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	C4	63.314.900,00	68.853.900,00	5.539,000
Alokasi Dana Desa	C5	594.595.700,00	591.016.100,00	3.579,600
Bantuan Keuangan Provinsi	C6	50.000.000,00	50.000.000,00	-
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	C7	124.946.000,00	124.946.000,00	-
Pendapatan Lain-lain	C8	13.700.000,00	14.318.231,00	618,231
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.077.184,600</b>	<b>2.046.088,679</b>	<b>31.065,921</b>
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	C9 dan C15	1.077.676.814,00	938.779.531,00	138.897,313
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C10 dan C15	703.524.700,00	682.783.450,00	21.141,250
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C11 dan C15	75.730.000,00	59.773.000,00	15.955,000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C12 dan C15	254.355.000,00	248.006.000,00	5.349,000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	C13 dan C15	108.062.300,00	100.800.000,00	7.262,300
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.219.748,814</b>	<b>2.030.143,981</b>	<b>189.604,863</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	C14:	<b>- 142.594,214</b>	<b>15.944,698</b>	<b>- 158.538,942</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		342.594.244,00	242.394.244,00	0
Pergerakan Pembiayaan		100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>142.594,244</b>	<b>142.394,244</b>	<b>-</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAH</b>		<b>-</b>	<b>158.538,942</b>	<b>- 158.538,942</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



NO	Nama dan Nomor / Identifikasi Awaris Tetap	Jenis	Bukti Kepemilikan		Kode Awaris Tetap	Tahun perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi Awal Tetap	Kec
			Nomor	Tanggal					
1	Jalan Desa Maklu, Jalmingray & Ngruluak				1.3.3.01		Rp 3.013.079.833,00		
a.	Jalan Perumahan						Rp 957.316.673,00		
1	Jalan Sanggalu Reuana				1.3.4.01.01	2015	Rp 1.120.200,00	B	
2	Jalan Sumbares RT 19 (234 x 0,95 x 2754 m <sup>2</sup> )				1.3.4.01.02	2016	Rp 26.800.000,00	B	
3	Jalan Pital RT 04 (704 x 3 x 25,20 m <sup>2</sup> )				1.3.4.01.02	2017	Rp 35.485.500,00	B	
4	Jalan Sumbares RT 21 (95 x 3 x 23,40 m <sup>2</sup> )				1.3.4.01.02	2017	Rp 36.580.000,00	B	
5	Jalan Sumbares RT 24 (95 x 3 x 12,6 m <sup>2</sup> )				1.3.4.01.02	2017	Rp 15.000.000,00	B	
6	Jalan Pital (305 x 3 m)				1.3.4.01.02	2015	Rp 10.000.000,00	B	
7	Jalan Pital RT 09 (290 m)				1.3.4.01.01	2019	Rp 29.881.000,00	B	
8	Jalan Sumbares RT 21 (80 x 3 x 0,17 m <sup>2</sup> )				1.3.4.01.01	2018	Rp 36.881.000,00	B	
9	Jalan Nisanan Goo Desa (13 x 18 x 63,20 m <sup>2</sup> )				1.3.4.01.01	2016	Rp 29.417.000,00	B	
10	Jalan Garing (199 x 1,25 x 103,25 m <sup>2</sup> )				1.3.4.01.03	2016	Rp 26.650.000,00	B	
11	Jalan Pital RT 3 (1,20 m + Geong P. 4 m (V.10 m3))	BAST	602/PD/PTKX/2019		1.3.4.01.03	2019	Rp 35.985.000,00	B	
12	2.240.000	BAST	612/PD/PTKX/2019		1.3.4.01.02	2019	Rp 53.091.000,00	B	
13	Jalan Perumahan: Pital - Nuk Beuk	BAST	12/2010/010/00/00/2010	01.04	1.3.4.01.02	2010	Rp 155.511.000,00	B	Masih Perak CK
14	Jalan Perumahan Bata 242,30 m <sup>2</sup> (Agung RT 11 - Cuntang)	BAST	2078/BAST/0515/1909/2020	19.06	1.3.1.01.02	2020	Rp 237.767.473,00	B	Iliah - PISW TA 2020
15	JALAN USHA TAN NGRONG (MIRA BAKTI ITH)	BAST	246/PTKX/072023	31.08	1.3.4.01.02	2023	Rp 91.746.000,00	B	Karya Bek: INI
16	10 TALUD LAMPINGAN PATUK	BAST	24-JUN-13.4.01.02		1.3.4.01.02	2013	Rp 32.800.500,00	B	
17	FOR RIBAT JAMU TISAK	BAST	24-JUN-13.4.01.02		1.3.4.01.02	2013	Rp 70.154.000,00	B	
18	CDR RIBAT JALAN PADUKUHAN GUMITUNG	BAST	1.3.4.01.02		1.3.4.01.02	2010	Rp 24.890.000,00	B	
19	CDR RIBAT JALAN PADUKUHAN PATUK (RT 07)	BAST	1.3.4.01.02		1.3.4.01.02	2013	Rp 19.990.000,00	B	
b.	Talud/ Bojong Jalan						Rp 965.288.100,00		
1	Talud di Pital (99 x 0,4 x 1 m)				1.3.4.01.04	2015	Rp 59.611.000,00	B	
2	Talud di Pital (85 x 0,35 x 56, 01 m3)				1.3.4.01.04	2015	Rp 46.500.000,00	B	
3	Talud di Ngaribing (61,5 x 1,5 x 35,30 m3)				1.3.4.01.04	2016	Rp 25.898.800,00	B	
4	Talud di Sumbares (71,5 x 1,55 x 64,33 m3)				1.3.4.01.04	2016	Rp -66.177.000,00	B	
5	Talud di Ngaribing RT 08 (160 x 1,5 x 160 m3)				1.3.4.01.04	2017	Rp 815.925.000,00	B	
6	Talud di Gumitung RT 14 (69 x 1,64 x 21 m3)				1.3.4.01.04	2017	Rp 20.935.000,00	B	

NO	Nama Pemilik/Identitas Awar Tetap	Bukti Kepemilikan		Kode surat tetap	Tahun perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi Awar Tetap	Ket
		Jenis	Nomor					
7	Talud di Gunung RT 15 (13 x 2 x 9 m)			15.4.01.04	2017	Rp 8.152.500,00	B	
8	Talud di Sumberetes RT 23 (17x 1,5 x 5,25 m)			15.4.01.04	2017	Rp 35.925.000,00	B	
9	Talud di Ngimbang RT 12 (1,28 x 1,5 x 0,3 m)	BA5T	21/776/VII/2018	21/08/2018	2018	Rp 45.858.000,00	B	
10	Talud di Gunung RT 18 (100x 1,5 x 0,3 m)	BA5T	13/776/VII/2019	21/08/2018	2018	Rp 49.777.000,00	B	
11	Talud di Ngimbang RT 10 (1,5 x 2 x 0,3 m)	BA5T	13/776/VII/2020	21/08/2018	2018	Rp 33.337.000,00	B	
12	Talud di Gunung RT 13 (8,3 x 1,3 x 0,3 m)	BA5T	13/1776/VII/2021	21/08/2018	2018	Rp 17.707.000,00	B	
13	Talud di Patak RT 04 (P. 25 m (V. 40,12 m)) Gorong - gorong Plat Beton P 4 m (V.28 m)	BA5T	013/910/PTK/VII/2018	27/07/2019	2019	Rp 53.693.000,00	B	
14	Talud di Ngimbang RT 8 (P. 145 m, V. 75,50 m) + TPK 1 x 3,825 m	BA5T	013/910/PTK/VII/2019	27/07/2019	2019	Rp 64.559.000,00	B	
15	Talud di Ngimbang RT 9 (P. 33 m, V. 69,36 m)	BA5T	013/910/PTK/VII/2019	27/07/2019	2019	Rp 56.420.000,00	B	
16	Talud di Gunung RT 14 (P. 50 m, V. 33,60 m)	BA5T	013/910/PTK/VII/2019	27/07/2019	2019	Rp 48.465.000,00	B	
17	Umbi di Patak RT 04 (P. 20 m, v. 47,35 m)	BA5T	013/910/PTK/VII/2019	27/07/2019	2019	Rp 41.371.000,00	B	
18	Talud Lembangan Sumberetes RT 25 (P.57 m, V.68,16 m)	BA5T	6/PTK-Talud/2020	26/02/2020	2020	Rp 24.385.000,00	B	
19	Talud RT 22 Ngimbang	BA5T	/P/PTK/VII/2021	30/04/2021	2021	Rp 35.000.000,00	B	
20	Talud jalan skala kecil Pasukan Ngimbang RT 09 (Talud P. 14,25, V. 8,00 m)	BA5T	05/P/PTK/VII/2022	04/07/2022	2022	Rp 9.650.000,00	B	
21	Jalan Desa, Talud Produksi Sumberetes RT 22 (Talud P. 99,3, V. 127,31 m)	BA5T	05/P/PTK/VII/2022	05/09/2022	2022	Rp 60.761.000,00	B	
22	Cow Rakat Jalan RT 22 Sumberetes	BA5T	/P/PTK/VII/2022	13.4.01.04	2022	Rp 26.970.000,00	B	
2. Inpres, Embung, Drainase, Air Umbah				1.3.3.01		Rp 951.355.000,00		
h. Drainase & Gorong - gorong						Rp 764.797.500,00		
1	Drainase Gunung (70 m)			1.3.4.01.05	2015	Rp 10.000.000,00	B	
2	Drainase Patak (50 x 62 x 1,6 m)			1.3.4.01.05	2015	Rp 10.000.000,00	B	
3	Drainase Sumberetes (225 m)			1.3.4.01.05	2015	Rp 63.771.000,00	B	
4	Drainase Patak (42 x 62 x 1,3 m)			1.3.4.01.05	2015	Rp -	B	
5	Drainase Patak (15 x 66 m)			1.3.4.01.05	2015	Rp 33.324.000,00	B	
6	Drainase Patak (92 x 9,35 x 36,66 m)			1.3.4.01.05	2015	Rp 25.000.000,00	B	
7	Drainase Gunung (286 x 0,3 x 1,45,12 m)			1.3.4.01.05	2015	Rp 79.383.000,00	B	
8	Drainase Sumberetes (16,5 x 0,30 x 42,68 m)			1.3.4.01.05	2015	Rp 46.747.500,00	B	

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Data Pribadi

Nama Lengkap : Zain Indranur  
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul 27 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota  
Bekasi, Jawa Barat  
Nomor Telepon :  
Email : zainindranur17@gmail.com

### II. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal  
SD: SDN JATIWARINGIN 9 - 2013  
SMP: SMPN 17 BEKASI - 2016  
SMA: SMAN 5 BEKASI – 2019  
IMM KOMSARIAT JENDRAL SOERDIMAN, SEKBID  
HIKMAH - Tahun 2022  
IMM UIN WALISONGO – 2023